



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

**KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2022 dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) .

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah mulai tahun 2022 diintegrasikan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Penggabungan dua jenis laporan Sesuai Surat Edaran Kementerian PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. Kebijakan penggabungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam SE Nomor 5 Tahun 2021 dijelaskan terhitung sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi tidak menyusun laporan kinerja tersendiri. Karena laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota/provinsi disusun menjadi satu dengan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD). Sistematika format penyusunan LPPD mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020.

Informasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang terdapat dalam LPPD mencakup Perencanaan Kinerja dan Capaian Akuntabilitas Kinerja. Pada Bab I LPPD diurai terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan informasi yang harus disampaikan adalah tentang tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan target kinerja sebagaimana table 5.2 RPJMD serta menyampaikan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah tahun pelaporan.

Sedangkan untuk capaian akuntabilitas kinerja dijelaskan dalam LPPD pada Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemeirntah Daerah terkait Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Pada Bab II memuat: Pertama, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah. Kedua, Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Ketiga, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD. Keempat, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan



standar nasional (jika ada).Kelima, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Keenam, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Ketujuh, analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

LPPD sebelum disampaikan ke Kemenpan RB dan Kemendagri terlebih dahulu mendapat revidi Inspektorat dengan hasil revidi/ Pernyataan telah direvidi dilampirkan pada LPPD untuk memastikan bahwa informasi telah menyajikan data kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Setelah di revidi Inspektorat LPPD disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota ke Menteri PAN dan RB melalui sistem esr.menpan.go.id. dan Mendagri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 secara lengkap terdiri dari 4 Bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Potensi Daerah, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Keuangan, dan Isu Strategis
- Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dan Indikator Kinerja Utama
- Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
- Bab IV Penutup

Atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta dukungan instansi terkait kami mengucapkan terima kasih. Pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap mengalami peningkatan atas evaluasi penerapan SAKIP Tahun 2023

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, peningkatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mempercepat perwujudan pembangunan menuju Mojokerto Maju, Adil dan Makmur.

Akhirul kalam. Wassalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Mojokerto, Maret 2023

Bupati Mojokerto

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si



IKHTISAR EKSEKUTIF

RPJMD periode Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebanyak 4 tujuan dengan 5 indikator tujuan dan 26 sasaran kinerja dengan 31 indikator.

Hasil pengukuran masing-masing sasaran telah dianalisis, yaitu membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, dijelaskan cara menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja dengan capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian juga disajikan program realisasi anggaran yang mendukung realisasi sasaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran atau indikator kinerja.

Berdasarkan analisis tingkat capaian kinerja sasaran dan tujuan dibandingkan penyerapan anggaran capaian kinerja dapat dicapai lebih besar dari capaian penyerapan anggaran. Perlu diketahui bahwa hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah disampaikan dan memperoleh predikat “BB”, nilai 73,42 pada Tahun 2022.

Capaian kinerja utama Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Misi 1 : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan						
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,03	74,89	99,81	
1	Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter bangsa Indonesia, serta pengoptimalan pemanfaatan IPTEK	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,11	12,96	98,85
		2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,88	8,97	101,01
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan	3	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,73	72,93	100,27



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19					
3	Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat	4	Indeks Daya Beli	0,789	0,796	100,88
4	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	5	Indeks Pembangunan Gender	90,04	91,22	101,31
		6	Indeks Kesalehan Sosial	66,06	80,98	122,58
5	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	7	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	71,88	72,84	101,33
Rata – rata Capaian						103,37
Misi 2 : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan						
Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada agrobisnis, agroindustry, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah			Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	01,17-4,70	5,09	108,29
6	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan local menuju	8	PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	47.019.003,40	40.444.980,83	86,01
		9	PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan	9.117.355,00	7.287.760,82	79,93



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	perekonomian daerah		Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)			
		10	PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Ketahanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	6.862.644,60	5.590.756,20	81,46
7	Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)	11	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	2,69 %	44,59 % (6.214.169.102,98)	1.657,62 %
8	Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi	12	Nilai Realisasi Investasi	3.339.721.880.000	4.433.580.180.000	132,75
		13	Persentase Peningkatan Laba BUMD	1.00%	0,46 %	46
9	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	14	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UM	0,5%	1,81 %	362
10	Optimalisasi peningkatan PAD	15	Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30.00%	1,14 %	3,8
			Indeks Gini	0,317	0,327	103,15
11	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industri	16	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,71	103,61 (Tahun 2021) Untuk 2022 masih proses penghitungan	88,77
12	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	17	Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	0,750	0,766	102,13
13	Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS	18	Persentase Penduduk Miskin	9,97	9,71	97,39
14	Penurunan angka pengangguran	19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,42	4,83	89,11
Rata – rata Capaian						235,58
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan						
Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	BB (70,5)	B (64,91)	92,05	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
berintegritas, akuntabel, bersih, transparan						
15	Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN	20	Indeks Profesionalitas ASN	81.00	67,22	82,98
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.00	86,16	102,57
17	Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	22	Nilai Sakip	BB (78,00)	BB (73,42)	94,12
18	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	23	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	70,10	74	105,71
19	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah	24	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100
20	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,60	2,73	105
Rata – rata Capaian					98,4	
Misi 4 : Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan						
Tujuan 4 : Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan			Indeks Infrastruktur	13,089	14,248	108,85
21	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	26	Persentase Lokasi Kumuh yang tertangani	3,18 % lokasi kumuh	17,18 %	540,25
22	Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau	27	Persentase Penanganan RTH	16,40 %	16,10 %	98,17
23	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	28	Tingkat Keselamatan Transportasi	6,21	38,8	624,80



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
24	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	29	Persentase infrastruktur kondisi baik	72,38 %	61,03 %	84,31
25	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	30	IKLH	64,20	69,92	108,90
26	Pencegahan dan penanggulangan bencana	31	Indeks Resiko Bencana (IRB)	114,67	99,84	87,06
Rata- Rata Capaian						257,24

Dari data diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten berdasarkan RPJMD periode Tahun 2021-2026 sebanyak 4 tujuan dengan 5 indikator tujuan dan 26 sasaran kinerja dengan 31 indikator. Dari 5 Indikator tujuan dengan persentase capai kinerja dalam kategori “Sangat Baik“ (diatas 100%) 3 indikator dan dengan kategori “Baik” (75%-100%) sebanyak 2 indikator. Perlu mendapat perhatian untuk pencapaian indikator kinerja sasaran terdapat 2 indikator kinerja yang tercapai sangat fantastis diluar prediksi perumus perencanaan daerah periode RPJMD 2021-2026.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 POTENSI DAERAH	3
1.4 KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	5
1.5 KONDISI WILAYAH GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS	6
1.6 PERANGKAT DAERAH.....	8
1.7 SUMBER DAYA APARATUR	9
1.8 SUMBER DAYA KEUANGAN.....	10
1.9 ISU STRATEGIS	11
BAB II	14
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
2.1 PERENCANAAN KINERJA	14
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	17
BAB III.....	29
AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO	30
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI PENGUKURAN KINERJA	34
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	91
BAB IV.....	97
PENUTUP	97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun :

- (1) Rencana strategis berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Rencana strategis berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016, kemudian diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; dan
- (4) Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Mojokerto tahun 2012



Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan iktisar yang menjelaskan secara ringkas capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Adapun maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah:

1. Untuk mengevaluasi kinerja dan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran di tahun 2022.
3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mojokerto tahun 2022 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah disepakati.

Adapun Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Presiden, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

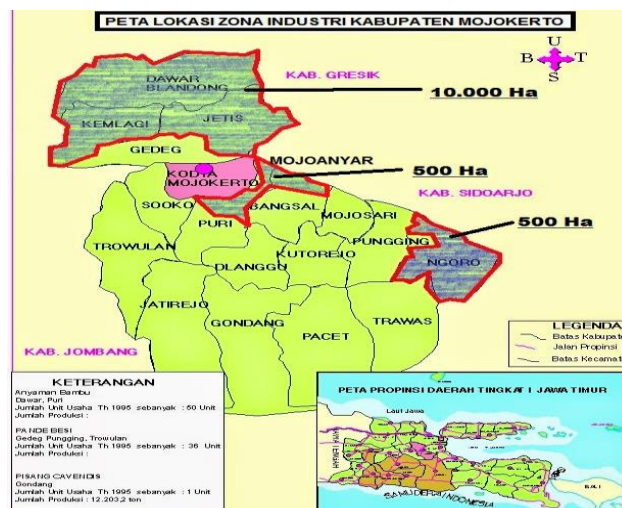
- a. Mendorong Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto;
- b. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
- c. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Sedangkan pelaporan kinerja termasuk pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2022 tersebut, akan disajikan dalam buku ini.

1.3 POTENSI DAERAH

Beberapa potensi unggulan daerah yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Mojokerto dapat diuraikan sebagai berikut :

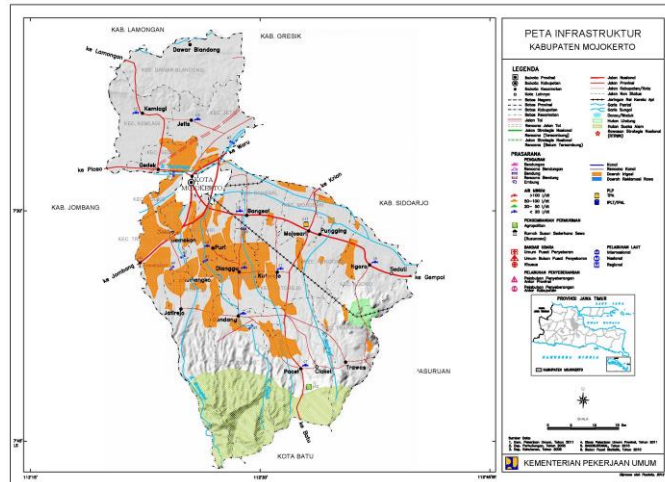
- a. Sektor industri :
 - Kemudahan akses transportasi pembangunan jalan darat Tol Sumo dan Tol Moker.
 - Kawasan industri kecamatan Ngoro ±500 ha; Kecamatan Jetis, Kemalgi dan Dawarbalndong±10.000 ha, Kecamatan Mojoayar ±500 ha.



- b. Sektor pariwisata: wisata alam, wisata kreasi, wisata edukasi dan minat khusus, wisata sejarah dan religin serta wisata belanja dan kuliner



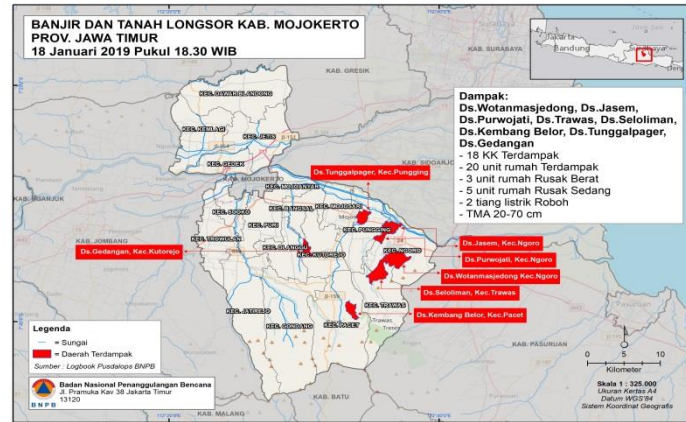
- c. Sektor Infrastruktur : pembangunan akses jalan pengubung kawasan industri, pembangunan akses menuju daerah wisata dan pembangunan jalan lingkungan untuk peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan.



- d. Sektor Pertanian : pembangunan sentra – sentra potensi komoditas pertanian dan perkebunan (Padi, hortikultura, biofarmaka, tanaman hias dan tanaman perkebunan serta ternak unggulan. Pertanian lahan basah tersebar di Kecamatan Gedeg, Jetis Dlanggu, Kutorejo, Pungging, Mojosari, Bangsal, Puri, Trowulan, Sooko, dan Mojoanyar serta sebagian kecil wilayah Kecamatan Pacet, Trawas, dan Gondang bagian utara serta sebagian wilayah Kecamatan Kemlagi. B. Pertanian Lahan Kering Kawasan Pertanian lahan kering di Kabupaten Mojokerto memiliki potensi khususnya komoditas perkebunan. Kebutuhan pertanian lahan kering khususnya dengan komoditas non pangan dipengaruhi oleh kegiatan pengolahan dan kebutuhan barang-barang sekunder. Sejauh ini terdapat sektor unggulan dan prospektif pada kawasan-kawasan lahan pertanian kering, yakni komoditas perkebunan berupa tembakau, tebu, dan pandan di Kecamatan Kemlagi, Dawarblandong, Jetis, Gedeg, Jatirejo, Gondang, Pacet dan Ngoro.

Adapun potensi wilayah rawan bencana di Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari 18 kecamatan secara garis besar dapat dipetakan menjadi 5 kategori bencana sebagai berikut :

- 1) Potensi Bencana Banjir : Kecamatan Mojoayar, kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojosari,(Luapan Sungai Sadar), Kecamatan Pungging (Luapan Sungai Sadar dan Gembolo), Kecamatan Ngoro (Sungai Sadar dan Sungai Porong), Kecamatan Gondang (Luapan Sungai Pikatan), Kecamatan Pacet (Luapan Sungai Kromong).
- 2) Potensi Bencana Tanah Longsor : Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet dan Kecamatan Trawas.
- 3) Potensi Bencana Angin Puting Beliung : Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko, Kecamatan Puri, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Kutorejo.
- 4) Potensi Bencana Kekeringan Lahan : Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jetis, Kecamtan Mojoayar, Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Ngoro.
- 5) Potensi Bencana Kebakaran Lahan : Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Trawas.



1.4 KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dengan nomenklatur sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
- b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;

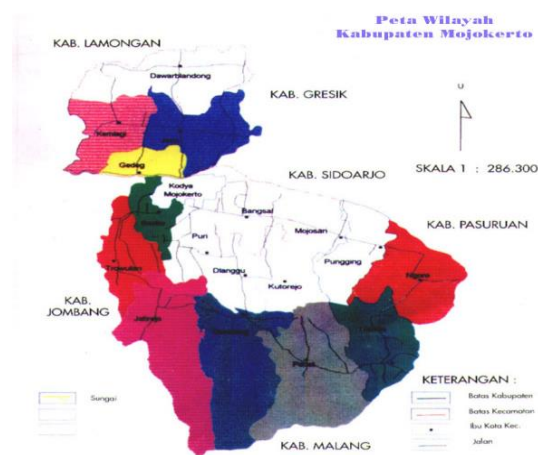


11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
- c. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian;
 3. kehutanan;
 4. energi dan sumber daya mineral;
 5. perdagangan;
 6. perindustrian; dan
 7. transmigrasi.

1.5 KONDISI WILAYAH GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

A. Aspek Geografis

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dimana luas wilayah seluruhnya adalah 97.546,97 Ha atau sekitar 2,09% dari luas Provinsi Jawa Timur. Secara geografis posisi wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 111°20'13" s/d 111°40'47" Bujur Timur dan antara 7°18'35" s/d 7°47" Lintang Selatan yang merupakan bagian integral dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif Kabupaten Mojokerto masuk Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, sedangkan secara spatial Tata Ruang Jawa Timur adalah masuk dalam kawasan pengembangan "Gerbang Kertosusila". Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 Kecamatan, 299 Desa dan 5 Kelurahan.



Potensi Wilayah Kabupaten Mojokerto Potensi Sumber Daya Alam Kawasan pelestarian alam di Kabupaten Mojokerto merupakan kawasan yang mempunyai keanekaragaman dan mempunyai ciri khas tertentu atau bernilai budaya tinggi baik itu secara



alami maupun buatan manusia yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi. Kawasan ini berada pada wilayah selatan seperti di Kecamatan Pacet, Gondang, Trawas, Jatirejo, dan Trowulan. Dengan luas hutan lindung terdapat di Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Trawas seluas 1420,694 Ha. Selain itu, di Kabupaten Mojokerto juga terdapat Taman Hutan Raya (Tahura). Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Taman Hutan Raya (Tahura) yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto adalah merupakan bagian dari Tahura R. Suryo. Tahura ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Pacet, Gondang, Trawas, dan Jatirejo. Kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 1128/Kpts-II/1992 tanggal 19 Desember 1992, selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 80/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dan merupakan bagian dari luas Taman Hutan Raya di Jawa Timur dengan luas total 7 Ha yang tersebar di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jombang. Secara administrasi Tahura R. Suryo berada di 4 (empat) Kabupaten yaitu: Sebelah Utara seluas 1.141,18 Ha masuk wilayah Kecamatan Pacet dan Trawas Kabupaten Mojokerto Sebelah Timur seluas Ha masuk wilayah Kecamatan Prigen, Purwosari, Purwodadi, dan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Sebelah selatan seluas 7.900,50 Ha masuk wilayah Kecamatan Ngantang, Pujon, Batu, Singosari, dan Karangploso Kabupaten Malang. Sebelah barat seluas 2.864,7 Ha masuk wilayah Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.

B. Aspek Demografis

Data kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan. Fungsi obyek bermakna penduduk menjadi target dan sasaran pembangunan, dan fungsi subyek bermakna penduduk adalah pelaku tunggal dari semua kegiatan pembangunan. Kedua fungsi tadi diharapkan dapat berjalan siring dan sejalan secara integral.

Jumlah penduduk yang besar menjadi modal dan potensi yang besar pula, namun demikian peningkatan jumlah penduduk harusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Berikut Tabel jumlah penduduk yang tersebar di 18 kecamatan Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Bulan Desember Tahun 2022				
No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jatirejo	22.781	22.024	44.805
2	Gondang	22.075	21.791	43.866
3	Pacet	30.035	29.763	59.798
4	Trawas	15.768	15.627	31.395
5	Ngoro	42.207	42.163	84.370



6	Pungging	40.015	39.647	79.662
7	Kutorejo	33.990	33.105	67.095
8	Mojosari	40.075	39.594	79.669
9	Dlanggu	28.887	28.475	57.362
10	Bangsalsari	26.262	25.996	52.258
11	Puri	39.698	39.075	78.773
12	Trowulan	38.765	37.610	76.375
13	Sooko	37.082	36.681	73.763
14	Gedeg	28.964	28.832	57.796
15	Kemlagi	29.863	29.717	59.580
16	Jetis	44.144	42.712	86.856
17	Dawarblandong	25.738	26.032	51.770
18	Mojoayar	25.014	24.706	49.720
Total		571.363	563.550	1.134.913

*Sumber data Dispenduk capil Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

1.6 PERANGKAT DAERAH

Perangkat daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sesuai potensi daerah, beban kerja, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Perangkat daerah Kabupaten Mojokerto yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sebagai tindak lanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Mojokerto yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah maupun Peraturan Bupati Mojokerto mengenai pembentukan unit pelaksana teknis.

Susunan Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 dengan jumlah sebanyak 46 perangkat daerah, yaitu:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja;



11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
12. Dinas Pangan dan Perikanan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
21. Dinas Pertanian;
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Badan Pendapatan Daerah;
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Kecamatan, yang terdiri dari;

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1) Kecamatan Gondang; | 10). Kecamatan Puri; |
| 2) Kecamatan Pacet; | 11). Kecamatan Trowulan; |
| 3) Kecamatan Trawas; | 12). Kecamatan Jatirejo; |
| 4) Kecamatan Dlanggu; | 13). Kecamatan Sooko; |
| 5) Kecamatan Kutorejo; | 14). Kecamatan Mojoayar; |
| 6) Kecamatan Pungging; | 15). Kecamatan Kemlagi; |
| 7) Kecamatan Mojosari,; | 16). Kecamatan Gedeg; |
| 8) Kecamatan Ngoro; | 17). Kecamatan Jetis; |
| 9) Kecamatan Bangsal; | 18). Kecamatan Dawarblandong; |

1.7 SUMBER DAYA APARATUR

Dengan manajemen kepegawaian yang baik diharapkan memperoleh aparatur pemerintah daerah yang profesional, sehingga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah dapat dicapai.

Sebagai informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan roda pemerintahan didukung oleh SDM sebanyak 6.865 orang, terdiri dari CPNS dan PNS.

Berdasarkan Jenis Kelamin	
Laki-laki	3.008
Wanita	3.857



Berdasarkan jenis kelamin CPNS dan PNS tahun 2022, laki-laki sebanyak 3.008 dan wanita sebanyak 3.857.

Berdasarkan Golongan / Pangkat	
CPNS	88
Golongan I	74
Golongan II	1.213
Golongan III	3.696
Golongan IV	1.794

Berdasarkan jenjang kepangkatan CPNS dan PNS tahun 2022, sebagian besar terdapat pada golongan III sebanyak 3.696 atau sebesar 53,84%, golongan IV sebanyak 1.794 atau sebesar 26,13%, golongan II sebanyak 1.213 atau sebesar 17,67%, CPNS sebanyak 88 atau sebesar 1,28% dan golongan I sebanyak 74 atau sebesar 1,08%.

Berdasarkan Pendidikan	
SD	30
SLTP	135
SLTA	1.074
D1	16
D2	182
D3	662
D4	176
S1	4.039
S2	588
S3	3

Sedangkan bila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan CPNS dan PNS terbanyak dengan urutan pendidikan S1 sebanyak 4.039 atau sebesar 58,83%, SLTA sebanyak 1.074 atau sebesar 15,64%, S2 sebanyak 588 atau sebesar 8,57%, D3 sebanyak 662 atau sebesar 9,06%, D2 sebanyak 182 atau sebesar 2,65%, D4 sebanyak 176 atau sebesar 2,56%, SLTP sebanyak 135 atau sebesar 1,97%, dan SD sebanyak 30 atau sebesar 0,44%.

1.8 SUMBER DAYA KEUANGAN

Sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tahun 2022 Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :



NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	Pendapatan Daerah	2.350.987.624.290	2.479.818.876.851
1.1.	PAD	558.653.322.250	616.647.952.231
1.2.	Pendapatan Transfer	1.693.342.542.040	1.764.179.164.620
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	98.991.760.000	98.991.760.000
2.	Belanja Daerah	2449.758.308.645	2.989.685.090.911
2.1.	Belanja Operasi	1.701.197.275.864	1.909.688.858.521
2.2.	Belanja Modal	221.959.765.776	407.319.038.188
2.3	Belanja Tidak Terduga	37.350.847.264	103.763.220.084
2.4	Belanja Transfer	489.250.419.741	568.913.974.118
	Surplus/Defisit	98.770.684.355	509.866.214.060
3.	Pembiayaan Lainnya	98.770.684.355	509.866.214.060
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	98.770.684.355	509.866.214.060
	Pembiayaan Neto	98.770.684.355	509.866.214.060

1.9 ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis atau permasalahan dalam pelaksanaan prioritas pembangunan di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2022 yang juga tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia

Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi. Upaya pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup manusia yang cukup signifikan baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi maka akan terlahir generasi penerus yang berkualitas. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Pada sektor pendidikan berfokus pada pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan. Adapun peningkatan kualitas dilakukan dengan pemenuhan sarana/prasarana kelengkapan belajar mengajar pada tiap satuan pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Hal ini serupa dengan isu strategis bidang pendidikan yaitu peningkatan akses pelayanan dan kualitas layanan pendidikan dasar, kompetensi guru dan sarana prasarana. Sedangkan pada sektor kesehatan berfokus pada peningkatan sarana pelayanan kesehatan baik RSUD, Puseksmas dan Puskesmas



Pembantu (Pustu). Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga berupaya meningkatkan derajat kesehatan melalui masyarakat atau yang dikenal sebagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di antara lain melalui Posyandu, Poskesdes, Polindes dan Posbindu serta pengembangan Desa Siaga.

2. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Kemiskinan tidak hanya merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat dunia saja. Namun merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat nasional maupun provinsi. Seluruh Kab/Kota di Indonesia berupaya mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya.

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pusat Pertumbuhan Industri nasional.

Di Kabupaten Mojokerto sendiri, sektor industri secara konsisten merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, secara relatif besarnya kontribusi tersebut nyatanya kurang optimal dan cenderung stagnan. Selain itu, sektor industri secara faktual ternyata masih belum mampu menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan posisi geografis, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN), yang dikenal dengan "Gerbang Kertosusila". Posisi ini menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu wilayah prioritas dalam percepatan pembangunan ekonomi guna menunjang perekonomian nasional. Disamping itu, dalam lingkup Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto termasuk dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang berpotensi dalam pengembangan industri besar.

4. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat.

Tata kelola pemerintahan merupakan hal yang fundamental untuk sebuah pemerintahan. Pemerintahan perlu mengambil bentuk yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemanfaatan bagi masyarakatnya. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan harus didukung oleh teknologi informasi dan internet. Karena perubahan perilaku dan interaksi masyarakat yang saat ini banyak menggunakan sistem daring atau online.

Kualitas tata kelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan suatu daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum,



keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), pemerintah daerah terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi nasional (RBN) di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan mindset dan cultureset. Selain itu peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan bersih dalam rangka prasyarat pembangunan yang berkualitas adalah terciptanya keamanan dan ketertiban.

5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana air bersih, air limbah, drainase, persampahan, penanganan kawasan kumuh, Sumber Daya Alam, dan RTLH. Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain pengentasan kemsikinan, penyuluhan kesehatan lingkungan, pembinaan masyarakat sadar lingkungan, pembangunan infrastruktur publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, pengelolaan kawasan bantaran / sepadan, peningkatan kesehatan masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Utama Berdasarkan RPJMD 2021-2026

VISI : <i>Ī H Y f k i ^ i K a b u p a t e n M o j o k e r t o y a n g M a j u , A d i l d a n M a k m u r m e l a u i P e n g u a t a n I n f r a s t r u k t u r d a n P e n i n g k a t a n K u a l i t a s S u m b e r D a y a M a n u s i a ĩ</i>				
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
MISI 1: Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter bangsa Indonesia, serta pengoptimalan pemanfaatan IPTEK	Harapan Lama Sekolah (HLS)
				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya	Angka Harapan Hidup (AHH)



			<p>pengecahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid-19</p>	
			<p>Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat</p>	<p>Indeks Daya Beli</p>
			<p>Meningkatnya kualitas pembangunan manusia</p>	<p>Indeks Pembangunan Gender</p>
				<p>Indeks Kesalehan Sosial</p>
			<p>Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat</p>	<p>Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)</p>
<p>MISI 2 : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan</p>	<p>Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada agrobisnis, agroindustry, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah</p>	<p>Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah</p>	<p>PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)</p>
				<p>PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)</p>
				<p>PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Ketahanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)</p>
			<p>Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)</p>	<p>Persentase Peningkatan PAD Pariwisata</p>
			<p>Meningkatnya pengembangan</p>	<p>Nilai Realisasi Investasi</p>



			jasa perbaikan dan investasi	Persentase Peningkatan Laba BUMD
			Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UM
			Optimalisasi peningkatan PAD	Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
		Indeks Gini	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industri	Nilai Tukar Petani (NTP)
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun (IDM)
			Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS	Persentase Penduduk Miskin
			Penurunan angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
MISI 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Meningkatnya integritas dan profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Nilai Sakip
			Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas	Nilai Opini BPK



			sesuai standar akuntansi pemerintah	
			Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
MISI 4 : Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentas lokasi kumuh yang tertangani
			Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau	Persentase Penanganan RTH
			Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Tingkat Keselamatan Transportasi
			Pemerataan, dan perluasan insfrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase infrastruktur kondisi baik
			Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	IKLH
			Pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)

2.2 PERJANJIAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,03
2	Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	2	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	1.17-4.70
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	3	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	70.5(BB)



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	4 Indeks Infrastruktur	13,089
5	Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK	5 Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,11
		6 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,88
6	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau Secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19	7 Angka Harapan Hidup (AHH)	72,73
7	Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat	8 Indeks Daya Beli	0,789
8	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	9 Indeks Pembangunan Gender	90,04
		10 Indeks Kesalehan Sosial	66,06
9	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	11 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	71,88
10	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah	12 PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	47,019,003.40
		13 PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	9,117,355.00
		14 PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	6,862,644.60
11	Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)	15 Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	2,69 %
12	Meningkatnya pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi	16 Nilai Realisasi Investasi	3.339.721.880.000
		17 Persentase Peningkatan Laba BUMD	1.00 %
13	Meningkatnya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	18 Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UM	0,5 %
14	Optimalisasi Peningkatan PAD	19 Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30.00 %
		20 Indeks Gini	0,317
15	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan agro bisnis dan agro industri	21 Nilai Tukar Petani (NTP)	116,71
16	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat di Desa Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	22 Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	0,750
17	Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS	23 Persentase penduduk miskin	9,97
18	Penurunan angka pengangguran	24 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,42
19	Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN	25 Indeks Profesionalitas ASN	81,00



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
20	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,00
21	Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	27	Nilai Sakip	78,00 (BB)
22	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	28	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	70,10
23	Meningkatnya Pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah	29	Nilai Opini BPK	WTP
24	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan	30	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,60
25	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	31	Persentase Lokasi Kumuh yang tertangani	3,18 %
26	Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau	32	Persentase Penanganan RTH	16,40 %
27	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	33	Tingkat Keselamatan Transportasi	6,21
28	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	34	Persentase Infrastruktur kondisi baik	72,38 %
29	terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	35	IKLH	64,20
30	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	36	Indeks Resiko Bencana (IRB)	114,67

No	Uraian Urusan, Organisasi dan Program	Anggaran
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.337.521.738.865
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	735.523.103.326
1	DINAS PENDIDIKAN	735.523.103.326
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	529.453.645.026
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	206.069.458.300
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	378.528.058.297
1	DINAS KESEHATAN	190.853.689.297
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	107.766.053.333
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	75.419.135.964
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.992.400.000
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	326.000.000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	350.100.000
2	RSUD PROF DR SOEKANDAR	112.065.982.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	105.395.982.000
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.670.000.000
3	RSUD RA BASOENI	75.608.387.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	73.288.387.000



2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.320.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	178.933.878.232
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	178.933.878.232
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.596.246.560
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.046.050.200
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.604.232.700
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.929.836.500
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.664.947.500
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	200.000.000
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.550.000.000
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	127.192.564.772
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.150.000.000
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.908.332.000
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	12.908.332.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.708.080.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	145.000.000
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.255.252.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	800.000.000
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.120.782.338
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.937.528.338
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.457.528.338
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.480.000.000
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.183.254.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.008.254.000
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.875.000.000
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.300.000.000
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.507.584.672
1	DINAS SOSIAL	9.507.584.672
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.222.703.840
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.775.000.000
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	659.880.832
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	600.000.000
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	250.000.000



II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	125.914.256.628
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.729.080.600
1	DINAS TENAGA KERJA	6.729.080.600
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.002.800.600
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.135.000.000
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	256.280.000
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	335.000.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	460.000.000
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	460.000.000
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	70.000.000
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	135.000.000
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	10.000.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	25.000.000
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	80.000.000
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	140.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.442.360.000
1	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	10.442.360.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.431.229.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.100.000.000
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.758.791.000
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50.000.000
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	102.340.000
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	50.000.000
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	50.000.000
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	15.000.000
2	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	20.000.000
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	22.413.482.000
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	22.413.482.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.772.282.000
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	830.000.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.260.000.000
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	45.000.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	165.000.000



	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	160.000.000
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	40.000.000
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	55.000.000
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.936.200.000
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.501.135.000
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.501.135.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.200.363.000
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	767.772.000
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	383.000.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	150.000.000
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.006.125.608
1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.006.125.608
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.136.125.608
2	PROGRAM PENATAAN DESA	150.000.000
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	150.000.000
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7.775.000.000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	795.000.000
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18.300.987.400
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	18.300.987.400
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.058.303.400
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	266.865.000
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.708.299.000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.267.520.000
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.637.937.500
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	2.637.937.500
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.637.937.500
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.672.616.000
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.672.616.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.298.616.000
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.575.000.000
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	9.799.000.000
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.071.587.000



1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	6.071.587.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.637.387.000
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	75.000.000
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	50.000.000
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	489.200.000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	510.000.000
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	160.000.000
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	150.000.000
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.670.063.000
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.670.063.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.881.669.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	60.000.000
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	65.000.000
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	160.000.000
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	493.394.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	10.000.000
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.310.000.000
1	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	3.310.000.000
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	360.000.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.750.000.000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200.000.000
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	200.000.000
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.000.000
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	200.000.000
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	200.000.000
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.000.000
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	200.000.000
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	519.432.120
1	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	519.432.120
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	349.432.120
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	150.000.000
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	20.000.000
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.669.450.400
1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.669.450.400



1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.264.478.400
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	404.972.000
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	60.000.000
1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	60.000.000
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	45.000.000
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	15.000.000
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	55.035.145.213
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	680.000.000
1	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	680.000.000
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	10.000.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	595.000.000
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	75.000.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	11.096.755.320
1	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	11.096.755.320
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.610.880.760
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.135.874.560
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.265.000.000
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	25.000.000
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	60.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	28.651.770.897
1	DINAS PERTANIAN	28.651.770.897
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.070.662.000
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.545.000.000
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.405.308.897
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	260.000.000
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.100.000.000
6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	18.000.000
7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.252.800.000
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	13.551.618.996
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.551.618.996
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.676.538.996
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.015.000.000
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100.080.000
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	70.000.000
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	645.000.000



6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	45.000.000
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.055.000.000
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.055.000.000
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	900.000.000
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	70.000.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	85.000.000
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	146.942.332.870
1	SEKRETARIAT DAERAH	71.697.304.936
1	SEKRETARIAT DAERAH	71.697.304.936
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.760.693.141
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	23.909.500.000
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8.027.111.795
2	SEKRETARIAT DPRD	75.245.027.934
1	SEKRETARIAT DPRD	75.245.027.934
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.974.067.815
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	34.270.960.119
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	695.921.888.607
1	PERENCANAAN	12.905.486.538
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.905.486.538
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.031.905.198
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.455.000.000
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.418.581.340
2	KEUANGAN	672.412.626.836
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	643.991.058.292
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	110.305.268.267
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	530.726.190.025
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.959.600.000
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	28.421.568.544
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.881.421.044
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.540.147.500
3	KEPEGAWAIAN	8.383.225.233
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.383.225.233
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.561.641.920
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.821.583.313
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.720.550.000
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.720.550.000



1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.720.550.000
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	500.000.000
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	500.000.000
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	500.000.000
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.457.020.304
1	INSPEKTORAT DAERAH	13.457.020.304
1	INSPEKTORAT	13.457.020.304
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.082.020.304
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	865.000.000
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	510.000.000
VII	UNSUR KEWILAYAHAN	65.390.515.257
1	KECAMATAN	65.390.515.257
1	KECAMATAN PURI	3.725.445.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.436.945.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.000.000
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	238.500.000
2	KECAMATAN SOOKO	2.728.898.412
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.497.381.412
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.000.000
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	196.517.000
3	KECAMATAN TROWULAN	3.171.328.251
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.874.514.920
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.603.151
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	260.210.180
4	KECAMATAN BANGSAL	3.412.942.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.166.442.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.000.000
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	222.500.000
5	KECAMATANG GEDEG	3.052.403.960
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.789.903.960
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.000.000
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	222.500.000
6	KECAMATAN KEMLAGI	3.389.380.480
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.157.821.800
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.058.680



3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	196.500.000
7	KECAMATAN JETIS	3.353.065.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.083.565.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.000.000
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	237.500.000
8	KECAMATAN DAWAR BLANDONG	3.273.926.960
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.006.426.960
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	237.500.000
9	KECAMATAN PACET	3.078.258.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.870.758.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.000.000
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	182.500.000
10	KECAMATAN PUNGGING	3.221.530.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.004.030.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	187.500.000
11	KECAMATAN NGORO	3.960.543.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.713.043.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.000.000
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	212.500.000
12	KECAMATAN KUTOREJO	2.779.640.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.582.140.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	177.500.000
13	KECAMATAN DLANGGU	2.873.167.480
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.630.667.480
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.000.000
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	197.500.000
14	KECAMATAN TRAWAS	3.143.789.844
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.901.289.844
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.000.000
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	207.500.000



15	KECAMATAN MOJOANYAR	3.040.690.776
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.827.690.776
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.000.000
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	173.000.000
16	KECAMATAN GONDANG	3.169.863.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.952.363.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.000.000
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	182.500.000
17	KECAMATAN JATIREJO	3.006.509.094
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.707.647.094
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.000.000
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	263.862.000
18	KECAMATAN MOJOASARI	11.009.134.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.810.319.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.000.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.951.315.000
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	212.500.000
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	9.575.410.901
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.575.410.901
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.575.410.901
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.628.477.880
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	130.000.000
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	30.000.000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.936.933.021
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100.000.000
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	750.000.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2022 sesuai RPJMD periode perencanaan 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 sesuai RPJMD periode perencanaan 2021-2026.

Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja tahun 2022 dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(\text{2 x Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Pada laporan ini disajikan informasi untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berikut hasil evaluasi dan analisis kinerja atas Misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2022 serta sasaran-sasaran strategis dengan alat ukur indikator kinerja utama disajikan sebagai berikut :



A. Capaian Kinerja Utama Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD 2016-2021

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Misi 1 : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan						
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,03	74,89	99,81	
1	Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter bangsa Indonesia, serta pengoptimalan pemanfaatan IPTEK	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,11	12,96	98,85
		2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,88	8,97	101,01
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19	3	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,73	72,93	100,27
3	Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat	4	Indeks Daya Beli	0,789	0,796	100,88
4	Meningkatnya kualitas	5	Indeks Pembangunan Gender	90,04	91,22	101,31



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	pembangunan manusia	6	Indeks Kesalehan Sosial	66,06	80,98	122,58
5	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	7	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	71,88	72,84	101,33
Rata – rata Capaian						98,81
Misi 2 : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan						
Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada agrobisnis, agroindustry, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah			Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	01,17-4,70	5,09	108,29
6	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan local menuju perekonomian daerah	8	PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	47.019.003,40	40.444.980,83	86,01
		9	PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	9.117.355,00	7.287.760,82	79,93
		10	PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Ketahanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	6.862.644,60	5.590.756,20	81,46
7	Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)	11	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	2,69 %	44,59 % (6.214.169.102,98)	1.657,62 %
8	Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi	12	Nilai Realisasi Investasi	3.339.721.880.000	4.433.580.180.000	132,75
		13	Persentase Peningkatan Laba BUMD	1.00%	0,46 %	46
9	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	14	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UM	0,5%	1,81 %	362
10	Optimalisasi peningkatan PAD	15	Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30.00%	1,14 %	3,8
			Indeks Gini	0,317	0,327	103,15



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
11	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industri	16	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,71	103,61 (Tahun 2021) Untuk 2022 masih proses penghitungannya	88,77
12	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	17	Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	0,750	0,766	102,13
13	Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS	18	Persentase Penduduk Miskin	9,97	9,71	97,39
14	Penurunan angka pengangguran	19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,42	4,83	89,11
Rata – rata Capaian						105,72
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan						
Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan			Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	BB (70,5)	B (64,91)	92,05
15	Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN	20	Indeks Profesionalitas ASN	81.00	67,22	82,98
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.00	86,16	102,57
17	Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	22	Nilai Sakip	BB (78,00)	BB (73,42)	94,12
18	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	23	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	70,10	74	105,71
19	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah	24	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100
20	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,60	2,73	105
Rata – rata Capaian						92,05
Misi 4 : Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan						



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Tujuan 4 : Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan		Indeks Infrastruktur	13,089	14,248	108,85	
21	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	26	Persentase Lokasi Kumuh yang tertangani	3,18 % lokasi kumuh	17,18 %	540,25
22	Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau	27	Persentase Penanganan RTH	16,40 %	16,10 %	98,17
23	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	28	Tingkat Keselamatan Transportasi	6,21	38,8	624,80
24	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	29	Persentase infrastruktur kondisi baik	72,38 %	61,03 %	84,31
25	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	30	IKLH	64,20	69,92	108,90
26	Pencegahan dan penanggulangan bencana	31	Indeks Resiko Bencana (IRB)	114,67	99,84	87,06
Rata- Rata Capaian					

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI PENGUKURAN KINERJA

Analisa atas pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rencana kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan RPJMD periode 2021-2026. Penyajian pelaporan kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Dalam sub bahasan ini akan dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, atas capaian kinerja



pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2022 periode 2021-2026 sebagai wujud pertanggungjawaban atas ketetapan kinerja yang telah diperjanjikan Bupati.

A. Capaian Kinerja Utama berdasarkan RPJMD 2016-2021

Berikut hasil analisis capaian kinerja 4 misi, 4 tujuan, 26 sasaran 31 indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap indikator kinerja yang telah dicapai tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 1

Misi 1 Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan						
Tujuan		Indikator Tujuan		Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		75,03	74,89	99,81
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
1	Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter bangsa Indonesia, serta pengoptimalan pemanfaatan IPTEK	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,11	12,96	98,85
		2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,88	8,97	101,01
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19	3	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,73	72,93	100,27
3	Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat	4	Indeks Daya Beli	0,789	0,796	100,88
4	Meningkatnya kualitas	5	Indeks Pembangunan Gender	90,04	91,22	101,31



Misi 1 Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	
Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,03	74,89	99,81	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	
pembangunan manusia					
	6	Indeks Kesalehan Sosial	66,06	80,98	122,58
5	7	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	71,88	72,84	101,33
Rata- Rata Capaian					99,81 %

Dari tabel di atas dapat diketahui ada 7 (tujuh) indikator untuk 5 (lima) sasaran yang mengampu Misi 1 (satu) yaitu Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan tujuannya adalah Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK

Tabel. 3.3

Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,88	12,95	100,54	13,11	12,96	98,85	-
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,51	8,64	101,52	8,88	8,97	101,01	-



Pada tahun 2022 untuk periode RPJMD 2021-2026 untuk mencapai sasaran 1 yaitu: “Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK” didukung dengan pelaksanaan program Pengelolaan Pendidikan dengan perangkat daerah penanggungjawab pelaksanaannya Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Sebagaimana data tersedia dalam tabel 3.3 bahwa Harapan lama sekolah mengalami peningkatan pencapaian target sebesar 0,01 di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Sedangkan para rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan sebesar 0,46 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai perangkat daerah pengampu Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Pendidikan meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan di Kabupaten Mojokerto melalui beberapa sasaran strategis yang terukur meliputi :

- ◁ Indikator dari tujuan yang ditetapkan yakni Harapan lama sekolah yakni sebesar 12,96 dari target yang telah ditetapkan sebesar 13,11. Hal tersebut artinya capaian dari Harapan Lama sekolah sangat tinggi dengan prosentase capaian sebesar 98,86%. Indikator kedua yakni Rata-rata lama sekolah juga mendapat capaian sangat tinggi dengan tingkat capaian sebesar 101,01%, dimana realisasi sebesar 8,97 dari target yang telah ditetapkan sebesar 8,88.
- ◁ Sasaran strategis 1 yakni meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mendapatkan predikat capaian sangat tinggi yakni 110.50%. dimana berdasarkan target yang telah ditetapkan sebesar 90% berhasil merealisasikan sebesar 99,45%.
- ◁ Sasaran strategis 2 yakni Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan dasar dengan indikator APK SD dan APK SMP mendapatkan capaian sangat tinggi. Hasil realisasi APK SD sebesar 102,5 dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 102,5%. Sedangkan APK SMP capaiannya mencapai 104,97%.
- ◁ Sasaran Strategis 3 yakni Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan. Realisasi dari indikator yakni APK Kesetaraan sebesar 12,55% dari target yang telah ditetapkan sebesar 20% sehingga capaiannya sebesar 64,75% dengan kategori rendah.
- ◁ Sasaran strategis 4 yakni Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator Nilai RB Perangkat Daerah, Nilai SAKIP perangkat Daerah, Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai, Persentase realisasi anggaran perangkat Daerah. dan IP ASN Dinas Pendidikan Hasilnya seluruh indikator mendapatkan capaian yang sangat tinggi kecuali Indeks Profesionalitas ASN yang mendapat capaian tinggi dengan nilai capaian 89,85%. Artinya tata Kelola dan birokrasi di lingkungan dinas pendidikan sudah sangat baik capaiannya.
- ◁ Sasaran strategis 5 yakni Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan indikator Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan



tersosialisasi serta berkelanjutan. Capaian dari indicator ini mencapai 133,33% dimana terrealisasi 4 inovasi dari target 3 inovasi yang direncanakan. Inovasi yang telah dilakukan yakni GEMAJUZA (Program Gerakan Menghafal Juz Amma), EMAS (Program Empati Anak Sebaya), PETIS ENAK (Pelayanan Efektif, Efisien, dan Tepat Sasaran, Enjoy, Nyaman, Akurat dan Kooperatif) dan PETIR (Podcast, *E-Learning*, TV Sekola Interaktif).

Pencapaian sasaran 1 “Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK” ini ditunjang dengan sumber daya anggaran dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan prioritas pada program pengelolaan Pendidikan.

Tabel 3.4

Dukungan Anggaran Sasaran

Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK
Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
Program Pengelolaan Pendidikan	200.521.717.115	182.452.961.756	90,99

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.5

Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran

Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK
Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK	99,93	200.521.717.115	90,99	8,94

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK dengan rata-rata capaian kinerja 99,93% dan capaian penggunaan



anggaran sebesar 90,99% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 2 :

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19

Tabel. 3.6

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19 Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Angka Harapan Hidup (AHH)	72,63	72,59	99,94	72,73	72,93	100,27	-

Pada tahun 2022 untuk periode RPJMD 2021-2026 untuk mencapai sasaran 2 yaitu: “Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau Secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19” didukung dengan pelaksanaan program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan perangkat daerah penanggungjawab pelaksanaannya Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

Sebagaimana data tersedia dalam tabel 3.6 bahwa Angka harapan Hidup mengalami peningkatan pencapaian target sebesar 72,73 di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan yaitu dengan penetapan kinerja utama peningkatan akses mutu pelayanan kesehatan dengan capaian tolak ukur meliputi :

- 1) Berdasarkan data capaian AKI Dinas Kesehatan Tahun 2022, terdapat 8 ibu yang meninggal atau 49,94/100.000 KH. Dimana angka tahun 2022 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 dengan jumlah kematian ibu sebanyak 67 ibu atau 417/100.000 KH.
- 2) Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut: 70 (sangat tinggi), 40 – 70 tinggi, 20-39 sedang, dan <20 rendah. Angka Kematian Bayi di tahun 2022 adalah 4,43/1.000 KH atau 71 bayi meninggal. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2021, angka kematian bayi adalah sama yaitu 4,4 dengan 71 bayi. Hal ini menunjukkan Dinas Kesehatan belum bisa menurunkan dari target yang ditetapkan tahun 2022.



- 3) Jumlah desa yang mengalami kejadian luar biasa. Dan pada tahun 2021, jumlah desa yang mengalami KLB, yaitu 304 desa. Jika dibandingkan dengan capaian 2022, jumlah desa yang terdampak KLB menurun yaitu 299 desa. Dimana untuk tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan yaitu 194 desa. Hal ini dikarenakan pada awal tahun 2022, masih tinggi kasus Covid-19 dengan varian omicron..
- 4) Sejak adanya pandemi, kegiatan akreditasi belum dilaksanakan. Termasuk pada tahun 2022. Meskipun sudah terjadi penurunan jumlah kasus covid-19 namun kegiatan penilaian akreditasi tahun 2022 tidak bisa dilaksanakan. Sehingga target adanya puskesmas dan faskes yang terakreditasi paripurna tahun 2022 tidak bisa terpenuhi. Puskesmas di Kabupaten Mojokerto yang terakreditasi paripurna hanya 1 Puskesmas yaitu Puskesmas Watukenongo sedangkan rumah sakit yang telah melaksanakan re-akreditasi tahun 2022 adalah RSUD Prof Dr Soekandar dan RSUD RA Basoeni dengan hasil Paripurna.

Pencapaian sasaran 2 “Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau Secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19” ini ditunjang dengan sumber daya anggaran dalam Urusan Pemerintahan Bidang kesehatan sebesar Rp. 530.135.342.355 dengan prioritas pada 5 program bidang kesehatan untuk mencapai kinerja utama meliputi:

Tabel 3.7

Dukungan Anggaran Sasaran

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19 Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	349.134.116.041	104.087.391.924	29,81
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	170.133.845.012	99.033.911.640	58,21
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.292.400.000	6.992.385.000	95,89
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	326.000.000	283.522.800	86,97
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.114.981.302	2.024.590.174	95,73
Total	530.135.342.355	212.421.801.538	40,07

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI



Tabel. 3.8

Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19 Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19	100,27	530.135.342.355	40,07	60,2

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19 dengan rata-rata capaian kinerja 100,27% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 60,2% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 3 :

Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat

Tabel. 3.9

Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Daya Beli	0,776	0,789	101,67	0,789	0,796	100,88	-

Pada tahun 2021 untuk periode RPJMD 2021-2026 untuk mencapai sasaran 3 yaitu: “Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat melalui strategi Melakukan upaya untuk menstabilkan harga dan akses masyarakat miskin dan berdaya beli rendah terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Pengukuran capaian indeks daya beli dilakukan oleh BPS dengan menghitung komponen indicator komposit dari sektor Pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat (standar hidup masyarakat) Kabupaten Mojokerto tahun 2022.



Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pencapaian IPM yang dibentuk dari indikator komposit Pendidikan, kesehatan dan daya beli. Daya beli masyarakat adalah salah satu alat ukur untuk mengestimasi pendapatan masyarakat secara riil. Dari data menunjukkan sejak tahun 2021 s.d 2022 indeks daya beli masyarakat Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan 0,007%.

Tabel 3.10
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.283.108.270	4.166.793.600	78,87
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	363.770.200	150.697.300	41,43
Total	5.646.878.470	4.317.490.900	60

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.11
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat	100,88	5.646.878.470	60	40,88

Untuk sasaran Meningkatkan akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat dengan tolak ukur indeks daya beli didukung anggaran dan program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan total anggaran Rp. 5.646.878.470 terealisasi sebesar Rp. 4.317.490.900 dengan perangkat daerah pelaksanaan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Indeks Daya beli/indeks Pengeluaran Kabupaten Mojokerto merupakan indeks yang mengukur standar hidup layak dengan menghitung kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan. Indeks daya beli juga merupakan salah satu indek pembentuk indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sesuai dengan arahan bapak presiden bahwa pemulihan ekonomi terus diupayakan maka,



Pemerintah Daerah Perlu menyikapi hal ini dengan serius yaitu upaya upaya peningkatan daya beli masyarakat melalui program dan kegiatan .Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sasaran 4 :
Meningkatnya kualitas pembangunan manusia

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. IPG digunakan untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia yang sudah memasukkan aspek gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IP.

Tabel. 3.12

Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatkan kualitas pembangunan manusia Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Pembangunan Gender	91,1	91,1	100	90,04	91,22	101,31	-
Indeks Kesalehan Sosial	64,70	65,33	100,97	66,06	80,98	122,58	-

Pada tahun 2022 untuk periode RPJMD 2021-2026 untuk mencapai sasaran 4 yaitu: “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia “ didukung dengan pelaksanaan 9 program pengendalian penduduk, Program pembinaan KB , program pemberdayaan dan peningkatan KS, program pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, program peningkatan kualitas keluarga, program pengelolaan sistem data gender dan anak, program pemenuhan hak anak, dan program perlindungan anak Kabupaten Mojokerto.

Sebagaimana data tersedia dalam table 3.12 bahwa Indeks pengarusutamaan gender mengalami peningkatan capaian kinerja di tahun 2022 sama dari pada tahun 2021 tercapai sebesar 1,31%.

Sedangkan capaian indeks kesalehan juga tidak mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 122,58% meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 100,97%. Tingkat kesalehan sosial dapat diukur dengan berbagai dimensi yang berbeda. Dimensi ini diambil dari sifat-sifat dan sikap seseorang yang mempunyai unsur-unsur kebaikan dan manfaat dalam hidup bermasyarakat. Hal ini dapat diukur dengan nilai solidaritas sosial, toleransi, kerjasama dan lainnya.



Pencapaian sasaran 4 “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia” dukungan sumber daya anggaran fokus pada pencapaian indeks pengarusutamaan gender meliputi 2 urusan. Pertama urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan program meliputi : program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, program peningkatan kualitas keluarga, program pengelolaan system data gender dan anak, program pemenuhan hak anak, program perlindungan khusus anak . Kedua urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan program meliputi: program pengendalian penduduk, program pembinaan KB, program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera.

Tabel 3.13
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya kualitas pembangunan manusia Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.005.299.000	6.765.934.196	96,58
Program Pemberdayaan dan Peningkatan KS	5.585.520.000	3.413.483.200	61,11
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	562.969.000	552.079.015	98,07
Program Perlindungan Perempuan	194.908.197	190.152.900	97,56
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	10.000.000	9.574.750	95,75
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	25.000.000	24.287.000	97,15
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	80.000.000	76.325.100	95,41
Program Perlindungan Khusus Anak	232.813.903	228.278.500	98,05
Total	13.696.510.100	11.260.114.661	92,46

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.14
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya kualitas pembangunan manusia Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	101,31	13.696.510.100	92,46	8,85

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dengan rata-rata capaian kinerja 101,31% dengan kategori sangat baik dan capaian penggunaan anggaran sebesar 92,46% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar 8,85%.



Sasaran 5 :
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Tabel. 3.15
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	69,48	69,48*	99,98	71,88	72,84*	101,33	-

*penelitian kerjasama Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Pada tahun 2022 untuk periode RPJMD 2021-2026 untuk mencapai sasaran 5 yaitu: “Meningkatnya keamanan dan Ketertiban Masyarakat” didukung dengan pelaksanaan program-program pendukung capaiannya dengan perangkat daerah penanggungjawab pelaksanaannya Bakesbangpol, Satpol PP dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Mojokerto.

Sebagaimana data tersedia dalam table 3.15. bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama pencapaian di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,35% dan pencapaian sasaran 5 “Meningkatnya keamanan dan Ketertiban Masyarakat” ini ditunjang dengan sumber daya anggaran dalam Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan prioritas program sebagaimana disajikan dalam tabel 3.16.

Tabel 3.16
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.732.574.791	13.118.435.326	89,04
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	9.841.708.177	7.453.704.871	75,74
Program Penanggulangan Bencana	2.479.504.750	2.410.791.102	97,23
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	6.974.366.067	6.892.173.450	98,82
Total	34.028.153.785	29.875.104.749	87,80

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI



Tabel. 3.17
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	101,33	34.028.153.785	87,80	13,53

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja “Meningkatnya keamanan dan Ketertiban Masyarakat” Tahun 2022 dengan rata-rata capaian kinerja 101,33% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 87,80% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran sebesar 13,53%. Dalam mencapai target sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto Meningkatkan Kemananan dan Ketertiban Masyakat, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menerapkan strategi melakukan upaya - upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya konflik, baik internal maupun di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat.

Tabel 3.18
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 2

Misi 2					
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	
Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	1.17-4.70	5,09	108,29	
	Indesk Gini	0,317	0,327	103,15	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	
6 Meningkatkan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan local menuju perekonomian daerah	8 PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	47.019.003,40	40.444.980,83	86,01	
	9 PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.117.355,00	7.287.760,82	79,93	



Misi 2						
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan						
Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian		
Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	1.17-4.70	5,09	108,29		
	Indesk Gini	0,317	0,327	103,15		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian		
	(dalam juta rupiah)					
	10	PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Ketahanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	6.862.644,60	5.590.756,20	81,46	
7	Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)	11	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	2,69 %	44,59 % (6.214.169.102,98)	1.657,62 %
8	Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi	12	Nilai Realisasi Investasi	3.339.721.880.000	4.433.580.180.000	132,75
		13	Persentase Peningkatan Laba BUMD	1.00%	0,46 %	46
9	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	14	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UM	0,5%	1,81 %	362
10	Optimalisasi peningkatan PAD	15	Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30.00%	1,14 %	3,8
11	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industri	16	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,71	103,61 (Tahun 2021) Untuk 2022 masih proses penghitungan	88,77%
12	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	17	Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	0,750	0,766	102,13



Misi 2						
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan						
Tujuan		Indikator Tujuan		Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah		Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi		1.17-4.70	5,09	108,29
		Indesk Gini		0,317	0,327	103,15
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
13	Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS	18	Persentase Penduduk Miskin	9,97	9,71	97,39
14	Penurunan angka pengangguran	19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,42	4,83	89,11
Rata-rata Capaian						105,72

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi; peningkatan PAD, investasi, laba BUMD; pertumbuhan Koperasi dan UMKM; kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya misi ini juga bertujuan untuk percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan nilai tukar petani, membangun desa, menurunkan penduduk miskin, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (decent job) dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan karena semakin membaiknya kinerja sektor Industri pengolahan. Hal ini sejalan dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian dunia. Geliat ekonomi di sektor Industri pengolahan semakin meningkat yang berdampak kepada aktivitas perdagangan. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti peningkatan dan pelebaran jalan raya, serta penyelesaian akhir proyek jalan tol yang melintas di Kabupaten Mojokerto, juga mempercepat laju pertumbuhan sektor konstruksi. Indikator ekonomi makro mencakup Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Inflasi, Nilai Tukar, Harga Minyak dan Tingkat Suku Bunga.



Salah satu bukti konkrit bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto sukses dalam rangka penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada menurunnya persentase tingkat kemiskinan. Persentase penduduk miskin dikabupaten Mojokerto dari tahun ketahun selalu lebih baik dari pada Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur. Sedangkan jika dibandingkan dengan Persentase Penduduk miskin Nasional Kabupaten Mojokerto masih diatas angka nasional. Untuk itu perlu adanya percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mencapai target tingkat kemiskinan menjadi satu digit. Sehingga aspek kemiskinan masih menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, disebabkan pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau capaian akhir dokumen RPJMD 2016-2021 dengan memasang target persentase kemiskinan di Kabupaten Mojokerto sebesar 9,17%.

Disamping masyarakat miskin, maka masyarakat yang termarginalkan juga harus dimasukkan dalam agenda pembangunan. Termasuk dalam hal ini masyarakat yang terkena dampak covid 19 sehingga menjadi tidak berdaya, kaum difabel yang kurang berdaya. Kebijakan sosial yang inklusif tidak membiarkan warga masyarakatnya yang termarginalkan menjadi korban akibat dampak pembangunan. Termasuk dalam hal ini warga yang menganggur karena adanya pemutusan hubungan kerja atau usahanya yang gagal dalam situasi saat ini. Hal ini dapat disebabkan dari berkurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah Kabupaten Mojokerto dan minat lembaga/instansi/perusahaan mencari SDM yang berkualitas, berintelektual tinggi dan berdaya saing karena masyarakat Kabupaten Mojokerto cenderung belum memiliki SDM yang memenuhi kebutuhan lembaga/instansi/ perusahaan. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesempatan kerja untuk penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktifitas ketenagakerjaan dan kompetensi tenaga kerja.

Sasaran 6 :

Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah

Tabel. 3.19

Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatkan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	45,003,318.80	32,153.799.11	71,44	47.019.003,40	40.444.980,83	86,01	-



PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	8,743,296.10	5,806.832.46	66,41	9.117.355,00	7.287.760,82	79,93	-
PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	6,668,825.10	3,884,603.71	582,55	6.862.644,60	5.590.756,20	81,46	-

Sasaran Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan local menuju perekonomian daerah dengan indikator kinerja pertama yaitu PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah) pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 47.019.003,40 ter realisasi sebesar 40.444.980,83 dengan capaian kinerja mencapai 86,01% dengan kategori penilaian cukup. Indikator kinerja kedua yaitu PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah) pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 9.117.355,00 ter realisasi sebesar 7.287.760,82 dengan capaian kinerja sebesar 79,93% dengan kategori penilaian cukup. Indikator kinerja ketiga yaitu PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah) pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 6.862.644,60 ter realisasi sebesar 5.590.756,20 dengan capaian kinerja sebesar 81,46% dengan kategori penilaian cukup.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan local menuju perekonomian daerah didukung dengan program – program prioritas yang dilaksanakan Perangkat Daerah meliputi :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melaksanakan 4 program yaitu:, program pengembangan ekspor, program standarisasi dan perlindungan konsumen, program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, program perencanaan dan pembangunan industry;
2. Dinas Pertanian yang melaksanakan 2 program yaitu : Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Program Perizinan Usaha Pertanian
3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang melaksanakan 2 program yaitu : Program pemberdayaan UMKM, Program pengembangan UMKM



4. Dinas Pangan dan Perikanan yang melaksanakan 7 program prioritas yaitu : Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program penanganan kerawanan pangan, program pengawasan keamanan pangan, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.

Tabel 3.20

Dukungan Anggaran Sasaran

Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program pengembangan ekspor	144.000.383	122.270.075	84,91
Program standarisasi dan perlindungan konsumen	847.004.495	777.203.237	91,76
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	195.000.000	161.820.300	82,98
Program perencanaan dan pembangunan industri	2.255.540.709	1.664.202.500	73,78
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	500.000.000	474.835.650	94,97
Program pemberdayaan UMKM	160.000.000	152.711.480	95,44
Program pengembangan UMKM	2.495.000.000	2.459.527.000	98,58
Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	2.100.000.000	2.077.793.000	98,94
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.165.791.000	1.503.305.680	69,41
Program penanganan kerawanan pangan	50.000.000	49.901.800	99,80
Program pengawasan keamanan pangan	102.340.000	97.933.975	95,69
Program pengelolaan perikanan tangkap	90.000.000	89.999.600	100,00
Program pengelolaan perikanan budidaya	1.129.250.000	1.035.277.200	91,68
Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	213.000.000	210.989.750	99,06
TOTAL	12.446.926.587	10.877.771.247	91,21

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Sasaran “Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah” Tahun 2022, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 12.446.926.587 dan teraealisasi sebesar 91,21%.

Langkah strategis sebagai upaya peningkatan capaian kerja sasaran ini adalah dengan optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan di Kab Mojokerto diantaranya dengan pengembangan Lokasi sentra industri kecil ini tersebar di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Sentra industri kecil ini pada umumnya merupakan permukiman industri dengan tenaga kerja dari penduduk lokal dan dikerjakan tiap rumah. Sentra industri kecil diarahkan pengembangannya melalui pengendalian terhadap pemanfaatan lahannya agar tidak terlalu padat dan dapat menarik



pengunjung, serta limbahnya dikelola secara bersama sehingga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman. Kawasan sentra industri kecil ini di kembangkan pada tiap wilayah kabupaten/kota, dan masing-masing memiliki ciri khas tersendiri, dan pengembangan agroindustri di Pacet dan Gondang

Tabel. 3.21

Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran

Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah	82,46	12.446.926.587	91,21	(8,75)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatkan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah dengan rata-rata capaian kinerja 82,46% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 91,21% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini belum mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran karena terbatasnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat menyebabkan kesejahteraan penduduk, pendapatan dan kinerja perekonomian secara agregat mengalami penurunan. Kondisi ekonomi secara agregatif ini merupakan hasil konfigurasi dari pencapaian ekonomi daerah. Sehingga dalam konteks menurunnya kinerja perekonomian nasional dapat dipastikan bahwa terjadi penurunan di level daerah meskipun tingkatannya bervariasi. Menurunnya kinerja perekonomian daerah menandakan terjadinya penurunan daya saing ekonomi daerah.

Sasaran 7 :

Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)

Untuk mencapai sasaran ke 7 Meningkatkan pengembangan pariwisata Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2022 berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mencapai target peningkatan PAD pariwisata dengan target sebesar 2,69% namun PAD sector pariwisata di Tahun 2022 terjadi kenaikan yang sangat tajam. Kenaikan pencapaian kinerja ini disebabkan masa transisi dari pandemi menjadi enddemi covid 19 yang mana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto diantaranya melalui :

- a. Pengembangan destinasi dan promosi wisata
- b. Peningkatan industri dan SDM Pariwisata
- c. Akselerasi dan integrasi kepariwisataan
- d. Pemulihan Pariwisata. Adalah strategi untuk tetap menjaga agar usaha sektor pariwisata tetap berjalan

Pemikiran logis dalam penetapan langkah strategis tersebut adalah karena sektor pariwisata selain membantu meningkatkan pendapatan juga berdampak langsung terhadap pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, sehingga sangat strategis untuk dijaga kelangsungan hidupnya.

Tabel. 3.22
Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll) Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	2,5%	1,2%	48	2,69 %	44,59 % (6.214.169.102,98)	1.657,62 %	-

Pencapaian sasaran Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll) Tahun 2021 dengan indikator persentase peningkatan PAD pariwisata di target 2,69 %. Pada tahun 2021 PAD pariwisata tercapai sebesar Rp. 2.610.354.700 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 6.214.169.102,98.

PAD Sektor pariwisata meliputi : wisata alam, wisata kreasi, wisata edukasi dan minat khusus, wisata sejarah dan religin serta wisata belanja dan kuliner. Sebaran wisata di Kabupaten Mojokerto. Adapun sebaran potensi PAD pariwisata Kabupaten Mojokerto terdapat 20 titik lokasi sebagaimana data gambar 3.1.

Gambar 3.1
Sebaran Objek Wisata di Kabupaten Mojokerto





Tabel 3.23
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)
Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	3.635.874.560	3.071.662.200	84,48
Program pemasaran pariwisata	2.340.750.000	2.270.111.726	96,98
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	190.000.000	185.459.080	97,61
Program pengembangan kebudayaan	811.398.780	784.739.300	96,71
Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	760.408.160	365.215.949	48,03
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	255.500.000	223.103.096	87,32
TOTAL	7.993.931.500	6.900.291.351	85,18

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Pencapaian Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll) Tahun 2022 didukung dengan 5 Program prioritas sebagaimana disajikan pada table 3.23 meliputi : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, Program pengembangan kebudayaan, Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, Program Pengembangan Kesenian Tradisional. Adapun anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp. 7.993.931.500 terrealisasi sebesar 85,18%.

Tabel. 3.24
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll) Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)	1.657,62	7.993.931.00	85,18	1.572,44

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll) dengan rata-rata capaian kinerja 1.657,62% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 85,18% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini sangat mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sebagai upaya peningkatan PAD Pariwisata maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan banyak pengembangan Kawasan wisata di Kabupaten Mojokerto, antara lain :

- a. Wisata alam berada di Kecamatan Trawas, Pacet, Ngoro, Jatirejo, dan Gondang yang berupa wisata alam pegunungan



- b. Wisata budaya dan peninggalan sejarah, dimana terdapat situs bersejarah yang memiliki nilai kultural yang tinggi yang lokasinya terdapat di Kecamatan Trowulan, yaitu situs bekas kerajaan Majapahit (cagar budaya) yang dikembangkan menjadi Mojopahit Park. Selain itu terdapat pula di Kecamatan Puri, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Pacet.
- c. Wisata buatan terletak di Kecamatan Kemlagi dan Pacet

Sasaran 8 :

Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi

Hasil pengukuran pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi tahun 2022 dengan 2 indikator kinerja Nilai Realisasi investasi dan persentase peningkatan laba BUMD menghasilkan rata-rata capaian 89.37 % dengan kategori baik. Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2 indikator kinerja sebagai salah satu efek endemi dari bencana pandemic covid 19 yang menyebabkan meningkatnya perekonomian secara nasional termasuk di Kabupaten Mojokerto. Dengan berputarnya kembali roda perekonomian maka secara otomatis berimbas pada naiknya investasi.

Tabel. 3.25

Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Nilai Realisasi Investasi	3.187.916.340.000	1.989.363.600.000	62,40	3.339.721.880.000	4.433.580.180.000	132,75	-
Persentase Peningkatan Laba BUMD	1,00%	13,6355	1,36	1,00%	0,46 %	46	-

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi di Tahun 2022 dengan 2 indikator kinerja pengukur yaitu:

1. Nilai realisasi investasi dengan target sebesar Rp. 3.339.921.880 tercapai sebesar Rp. 4.433.580.180.000 dengan persentase capaian 132,75 % (kategori sangat baik). Perangkat daerah pelaksana program untuk pencapaian indikator realisasi investasi adalah DPMPTSP. Capaian nilai realisasi investasi tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang hanya tercapai Rp. 1.989.363.600.000, peningkatan pencapaian nilai realisasi investasi di Kabupaten Mojokerto sebagai dampak enddemi Covid 19 yang berimbas besar pada investasi untuk penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.



2. Persentase Peningkatan Laba BUMD dengan target kinerja sebesar 1 % tercapai sebesar 0,46% sehingga hasil pencapaiannya sebesar 46% dengan kategori kinerja kurang baik.

Tabel 3.26
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program pengembangan iklim penanaman modal	155.000.000	152.532.570	98,41
Program promosi penanaman modal	115.000.000	113.136.100	98,38
Program pelayanan penanaman modal	270.000.000	259.743.369	96,20
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	553.394.000	520.267.293	94,01
Program pengelolaan data dan system informasi penanaman modal	25.000.000	24.060.000	96,24
Program perekonomian dan pembangunan	2.220.000.000	1.932.549.746	87,05
TOTAL	3.338.394.000	3.002.289.078	95,04

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.27
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi	89,37 %	3.338.394.000	95,04	(5,67)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatkan pengembangan jasa perbankan dan investasi dengan rata-rata capaian kinerja 89,37% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 95,04% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini belum mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran karena situasi industri dan ekonomi yang masih dalam transisi dari pandemi keenddemi sehingga masih ada beberapa investor yang belum berani untuk menanam dana di perusahaan-perusahaan tersebut.

Sasaran 9 :
Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun, berdasarkan pembagian kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota pada urusan ini adalah sebatas



pada urusan koperasi dan usaha mikro. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota tahunan atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Tabel. 3.28
Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UM	0,5 %	0,52%	104	0,5%	1,81 %	362	-

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas di bidang Koperasi dan Usaha Mikro berupaya melaksanakan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Mojokerto yang terdampak pandemic covid 19.

Tabel 3.29
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.731.787.000	4.304.857.375	90,98
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	75.000.000	72.786.600	97,05
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	50.000.000	48.987.100	97,97
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	519.200.000	490.931.691	94,56
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	510.000.000	504.364.800	98,90
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	160.000.000	152.711.480	95,44
Program Pengembangan Umkm	2.495.000.000	2.459.527.000	98,58
TOTAL	8.540.987.000	8.034.166.046	94,07

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI



Tabel. 3.30
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	362	8.540.987.000	94,07	267,93

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro dengan rata-rata capaian kinerja 362% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 94,07% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah sangat mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran

**Sasaran 10 :
Optimalisasi peningkatan PAD**

Sasaran optimalisasi peningkatan PAD Kabupaten Mojokerto tahun 2022 melalui kebijakan meningkatkan PAD untuk menekan ketergantungan terhadap dana Pusat melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Sasaran Optimalisasi peningkatan PAD dengan indikator kinerja Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 30.00% ter realisasi sebesar 1,14% dengan capaian kinerja mencapai 3,8% dengan kategori penilaian kurang baik.

Sebagaimana ketentuan kementerian Keuangan RI bahwa PAD merupakan total penjumlahan dari komponen-komponen. Diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah (penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, penerimaan atas kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan jasa giro (Permendagri No.13 tahun 2006).

Tabel. 3.31
Evaluasi Capaian Sasaran Optimalisasi peningkatan PAD Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30.00%	30,35	101,16	30.00%	1,14 %	3,8	-

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber



pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Rumusan Perhitungan dengan formulasi Tingkat Kemandirian Keuangan daerah sbb:

$$RK = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan: RK = Rasio Kemandirian

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Pendapatan Daerah

Upaya pengukuran rasio/tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dengan melakukan pengelompokan pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana gambar berikut :

Komponen Pendapatan Kabupaten Mojokerto

NO	KOMPONEN PENDAPATAN KAB MOJOKERTO	JUMLAH (RP)	REALISASI (RP)	%
1	PAD	616.647.952.231,00	676.708.151.150,77	109,73
	Pajak Daerah	347.700.000.000	369.860.322.350	106,37
	Retribusi Daerah	41.782.531.172,00	24.458.005.164,77	58,53
	Hasil Pengel Kekayaan daerah yang dipisahkan	5.933.363.773,11	9.043.413.586,63	152,41
	Lain-lain PAD yang sah	221.232.057.284,86	273.346.410.049,37	123,55
2	DAPER	1.764.179.164.620	1.800.754.809.295	102,07
	Dana Bagi Hasil pajak/bulanan	0	0	0
	Dana alokasi khusus	0	0	0
	Dana alokasi umum	0	0	0
3	Lain-lain pendapatan yang sah	98.991.760.000	5.887.699.000	5,94
	Hibah	0	0	0
	Dana darurat	0	0	0
	Dana bagi hasil pajak dari prop dan pemda lain	0	0	0
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0	0	0
	Bantuan keuangan dari prop/ pemda lain	0	0	0
	Lain-lain	98.991.760.000	5.887.699.000	5,94
	Total Pendapatan	2.479.818.876.851	2.573.381.324,77	103,77

Dalam pencapaian kinerja optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 yang merupakan leading sector perangkat daerah yang bertanggungjawab keberhasilan pencapaiannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, di dukung dengan anggaran APBD TA 2022 untuk program prioritas yaitu program pengelolaan pendapatan daerah sebesar Rp **8.574.324.600** dengan capaian kinerja tahun



2022 sebesar 94.35 %, menunjukkan keberhasilannya penerapan strategi -strategi peningkatan PAD di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 3.32
Dukungan Anggaran Sasaran
Optimalisasi peningkatan PAD Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.574.324.600	8.089.573.009	94,35
TOTAL	8.574.324.600	8.089.573.009	

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.33
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Optimalisasi peningkatan PAD Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Optimalisasi peningkatan PAD	3,8	841.061.789.540	94,35	(90,55)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah. PAD adalah sumber pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah. Oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap).

Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto selalu berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Sasaran 11 :

Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industri

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Tabel. 3.34

Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industri Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Nilai Tukar Petani (NTP)	116,69	102,22	87,59	116,71	103,61 (Tahun 2021) Untuk 2022 masih proses penghitungan	88,77	-

Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebesar 103,61% dari target sebesar 116,69% sehingga persentase capaian sebesar 88,77% dengan kategori baik. Untuk tahun 2022 belum dapat disajikan karena perhitungan NTP 2022 dilakukan di tahun 2023 oleh Bappeda, BPS dan Tim, sehingga data yang dapat disajikan adalah data NTP 2021 sebesar 103.16* (NTP Kab. Mojokerto tahun 2021), sehingga jika dibandingkan dengan target tahun 2022 capaian kinerjanya 88,77%.

Penurunan ini disebabkan karena indeks harga yang diterima petani lebih rendah dengan harga yang dibayar petani. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi secara umum lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

- ◁ Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib)

$$NTP = \frac{IT}{IB} \times 100 \%$$

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang



dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dan penambahan modal. Semakin tinggi NTP berarti semakin tinggi daya beli petani di pedesaan.

Tabel 3.35
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industri
Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.316.428.315	4.535.691.417	71,81
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.573.808.897	2.219.232.557	86,22
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	500.000.000	474.835.650	94,97
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	271.500.000	238.439.050	87,82
Program Perizinan Usaha Pertanian	18.000.000	16.790.000	93,28
Program Penyuluhan Pertanian	2.695.359.000	2.351.141.170	87,23
TOTAL	12.375.096.212	9.836.129.844	86,23

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Dukungan Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto untuk pencapaian kinerja Nilai tukar petani dengan perangkat daerah pelaksana Dinas Pertanian, Adapun strategi upaya yang dilaksanakan untuk peningkatan NTP antara lain : meningkatkan jumlah bantuan sarana prasarana bagi petani sesuai kebutuhannya dengan menerapkan by name dan by adres; dan memperkuat kemandirian pangan dengan meningkatkan produksi pertanian dengan optimalisasi penggunaan benih, pupuk dan pestisida, optimalisasi lahan, optimalisasi penyuluh dan sebagainya.

Tabel. 3.36
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industri
Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industri	88,77	12.375.096.212	86,23	2,54

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan agro bisnis dan agro industri dengan rata-rata capaian kinerja 88,77% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 86,23% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.



Sasaran 12 :

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu :

1. Indeks Ketahanan Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial dan Pemukiman)
2. Indeks Ketahanan Ekonomi (keragaman {Produksi Masyarakat, Akses Puser Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan kredit, Keterbukaan wilayah)
3. Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan (kualitas lingkungan, bencana alam, tanggap bencana)

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.

Tabel. 3.37

Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	0.738	0,7453	100,98	0,750	0,766	102,13	-

Pencapaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebesar 0,766 dengan target sebesar 0,750 sehingga persentasenya sebesar 102,13% dengan kategori sangat baik.



Tabel 3.38
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penataan Desa	250.000.000	249.161.850	99,66
Program Peningkatan Kerjasama Desa	180.000.000	165.982.850	92,21
Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.831.250.000	8.915.483.891	91,94
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.303.750.000	1.222.637.350	93,78
TOTAL	10.565.000.000	10.553.265.941	94,39

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.39
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	102,13	10.565.000.000	94,39	7,74

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan rata-rata capaian kinerja 102,13% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 94,39% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 13 :

Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dampak dari kemiskinan sangat kompleks menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dari masalah kemiskinan adalah meningkatnya jenis dan jumlah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya PPKS yaitu dengan menyelenggarakan



kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Salah satu sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam perencanaan daerah periode tahun 2021-2026 terkait dengan penanganan PPKS yaitu sasaran ke 13 “ Sistem Perlindungan Sosial dalam penanganan PPKS dengan indicator persentase penduduk miskin dengan target 9,97% dengan pencapaian kinerja tahun 2022 sebesar 9,71% atau tercapai sebesar 97,39% dengan kategori berhasil.

Tabel. 3.40
Evaluasi Capaian Sasaran Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase Penduduk Miskin	10,37	10,62	102,41	9,97	9,71	97,39	-

Indikator persentase penduduk miskin ini merupakan bentuk pengukuran kinerja yang bersifat negative dimana semakin tinggi hasil pencapaiannya menunjukkan hasil yang semakin buruk/jelek demikian pula sebaliknya, semakin rendah hasil pencapaiannya menunjukkan keberhasilan yang yang tinggi/baik. Penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto jika dibandingkan dengan data tahun 2021 sebesar 10,37% menunjukkan penurunan sebesar 0,4%. Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto tidak lepas dari dampak enddemik covid 19 yang berimbas pada kenaikan tingkat perekonomian.

Tabel 3.41
Dukungan Anggaran Sasaran Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
Program Pemberdayaan Sosial	1.840.000.000	1.736.915.737	94,40
Program Rehabilitasi Sosial	659.880.832	615.103.662	93,21
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	11.824.124.268	11.191.185.765	94,65



Program Penanganan Bencana	300.000.000	250.997.461	83,67
TOTAL	14.624.005.100	13.794.202.625	91,48

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Strategi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan sebagai bentuk upaya menurunkan penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto diantaranya dengan Pengembangan dan penguatan kapasitas PPKS dalam upaya penanganan PMKS. Perangkat daerah yang menjadi pelaksana program kegiatan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan dukungan APBD Tahun 2022 pada program prioritas urusan pemerintahan bidang sosial sebesar Rp. 14.624.005.100. dan teralisasi sebesar 91,48% atau sebesar Rp. 13,794,202,625.

Tabel. 3.42
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS	97,39	14.624.005.100	91,48	5,91

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS dengan rata-rata capaian kinerja 97,39% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 91,48% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 14 :

Penurunan angka pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. tingkat pengangguran terbuka secara nasional yang turun dari 5,54 persen di Desember 2021 menjadi sebesar 4,83 persen per Desember 2022.

NO	URAIAN	AGUSTUS 2020	DESEMBER 2021	DESEMBER 2022
1	Penduduk Usia Kerja (15 Th keatas	907.069	897.979	906.653
2	Angkatan Kerja :	620.390	632.808	646.778
	- Bekerja	584.689	597.775	615.557
	- Penganggur	35.701	35.033	31.221
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.75	5.54	4,83
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69.79	70.47	71,34



Tabel. 3.43
Evaluasi Capaian Sasaran Penurunan angka pengangguran Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,62	5,54	98,57	5,42	4,83	89,11	-

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Mojokerto tahun 2022 menurun sebesar 0,71% dibandingkan dengan tahun 2021. Di Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 5,42% tercapai sebesar 4,83 lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,54%. Penduduk Kabupaten Mojokerto yang usia produktif /bekerja (Usia 15 Th keatas) pada tahun 2022 sebanyak 906.653 pekerja, sedangkan di Tahun 2022 jumlah pengangguran sebanyak 31.221 orang dan di tahun 2021 mengalami penurunan 3.812 orang.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja TPT melebihi target yang ditetapkan adalah tidak lepas dari berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas tenaga Kerja sebagai perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenaga kerjaan telah bergerak dengan membuka akses pelatihan kerja dan memberikan informasi pasar kerja seluas luasnya pada masyarakat.

Tabel 3.44
Dukungan Anggaran Sasaran
Penurunan angka pengangguran Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.135.000.000	920.926.700	81,14
Program Penempatan Tenaga Kerja	256.280.000	234.342.892	91,44
Program Hubungan Industrial	385.000.000	376.706.150	97,85
TOTAL	1.776.280.000	1.531.975.742	90,14

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.45
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Penurunan angka pengangguran Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Penurunan angka pengangguran	89,11	1.776.280.000	90,14	(1,03)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Penurunan angka pengangguran dengan rata-rata capaian kinerja 89,11% dan capaian penggunaan anggaran



sebesar 90,14% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini belum mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran karena karena baik penurunan maupun kenaikan ini bersifat fluktuatif, faktor-faktor penyebabnya adalah iklim investasi dan kondisi hubungan industrial dapat mengalami situasi kurang kondusif yang disebabkan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Provinsi, sehingga efektifitas perusahaan dan produktifitas tenaga kerja terganggu, yang berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang nantinya dapat menyumbang angka pengangguran yang bertampan dan tingkat kemiskinan juga meningkat.

Tabel 3.46
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 3

Misi 3						
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan						
Tujuan		Indikator Tujuan		Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)		BB (70,5)	B (64,91)	92,05
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
15	Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN	20	Indeks Profesionalitas ASN	81.00	67,22	82,98
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.00	86,16	102,57
17	Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	22	Nilai Sakip	BB (78,00)	BB (73,42)	94,12
18	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	23	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	70,10	74	105,71
19	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah	24	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100
20	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,60	2,73	105
Rata- Rata Capaian						92,05

Dari tabel di atas dapat diketahui ada 6 (enam) indikator untuk 6 (enam) sasaran yang mengampu Misi 3 (tiga) yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas,



akuntabel, bersih, transparan tujuannya Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.

Misi ini bertujuan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui reformasi birokrasi, ASN yang profesional dan berintegritas, pelayanan publik yang berkualitas, pengelolaan keuangan yg berkualitas, dan pemerintahan berlandaskan IT. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi. Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan good and clean governance dalam mendukung implementasi kota cerdas sampai pada lini desa.

Sasaran 15 :

Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, khususnya sumberdaya aparatur, merupakan prioritas utama untuk dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang professional. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya ASN yang berkualitas, berkompentensi dan professional.

Untuk mengukur kinerja sasaran ke 15 dengan indikator Indeks profesionalitas ASN yang di target sebesar 81 di tahun 2022 tercapai sebesar 67,22 sehingga dengan persentase capain kinerja sebesar 82,98.

Tabel. 3.47

Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatkan Integritas dan profesionalisme ASN Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Profesionalitas ASN	81,00	56,7	70	81,00	67,22	82,98	-

Strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya meningkatkan kualitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto diantaranya dengan peningkatan kinerja ASN yang profesional, berintegritas dan berkapasitas berdasarkan sistem merit.

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan integritas dan profesionalitas ASN tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Mojokerto didukung dengan 2 program prioritas dengan anggaran sebesar Rp. 8.862.502.233 dengan perangkat daerah pelaksanaan program BKPSDM Kabupaten Mojokerto.



Tabel 3.48
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.012.226.920	5.519.596.761	91,80
Program Kepegawaian Daerah	2.850.275.313	2.039.222.627	71,54
TOTAL	8.862.502.233	7.558.819.388	85,28

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.49
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN	82,98	8.862.502.233	85,28	(2,3)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatkan Integritas dan profesionalisme ASN dengan rata-rata capaian kinerja 82,98% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 85,28% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini belum mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran karena adanya perubahan pengukuran yang sebelumnya dengan cara manual berubah menjadi pengukuran menggunakan Aplikasi DJASN dari BKN sehingga proses verifikasi semakin ketat.

Rendahnya nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 telah ditindaklanjuti pada tahun 2022 yaitu dengan meningkatkan profesionalitas pegawai melalui beberapa aspek yaitu peningkatan kompetensi pegawai, peningkatan disiplin pegawai dan penilaian kinerja pegawai sehingga target indeks profesionalitas pegawai pada tahun-tahun selanjutnya diharapkan dapat tercapai.

Sasaran 16 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan merupakan hal yang fundamental untuk sebuah pemerintahan. Pemerintahan perlu mengambil bentuk yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemanfaatan bagi masyarakatnya. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan harus didukung oleh teknologi informasi dan internet. Karena perubahan perilaku dan interaksi masyarakat yang saat ini banyak menggunakan sistem daring atau online. Disamping itu reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada kinerja yaitu hasil dan dampak positif terhadap masyarakat Mojokerto. Untuk hal ini dibutuhkan pemerintah yang melayani secara prima.



Tabel. 3.50
Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	84,12	102,58	84,00	86,16	102,57	-

Pencapaian sasaran 16 meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kiner Indeks kepuasan masyarakat di dukung 10 program prioritas dengan perangkat daerah pelaksana program sebanyak 10 Perangkat daerah meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Penanggulangan Bencana dan 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan prima di Kabupaten Mojokerto terus dilaksanakan. Namun, bukan berarti perwujudan pelayanan prima di Kabupaten Mojokerto terbebas dari kendala. Berbagai isu permasalahan seringkali menyertai upaya pelaksanaan pelayanan prima. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya keluhan dari masyarakat / pengguna pelayanan terkait dengan sistem dan prosedur pelayanan perijinan, kependudukan, dan sebagainya.

Tabel 3.51
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pendaftaran Penduduk	877.117.000	863.240.086	98,42
program Pencatatan Sipil	383.000.000	377.039.762	98,44
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	250.000.000	221.131.220	88,45
Program Pembinaan Perpustakaan	404.972.000	321.738.959	79,45
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	15.000.000	15.000.000	100,00
Program Pengelolaan Arsip	45.000.000	44.898.550	99,77
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	42.453.323.834	38.639.502.914	91,02
TOTAL	44.428.412.834	40.482.551.491	93,65

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI



Tabel. 3.52
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	102,57	44.428.412.834	93,65	8,92

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan rata-rata capaian kinerja 102,57% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 93,65% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 17 :

Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto

Belanja Daerah disusun dan diimplementasikan dengan berdasar pada pendekatan anggaran kinerja (Performance Based Budgeting) yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan anggaran kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan reliabilitas dan akurasi perencanaan anggaran serta menjamin akuntabilitas dari penggunaan anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan secara efektif dan efisien. Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Nilai evaluasi SAKIP Kabupten Mojokerto tahun 2022 yang di diperoleh dari Kementerian PAN dan RB RI adalah 73,42 Predikat BB hal itu menunjukkan bahwa Implementasi kauntabilitas kinerja “sangat baik”, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efiseiensi penggunaan anggaran dala mencapai kinerja serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Tabel. 3.53
Evaluasi Capaian Sasaran Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Nilai Sakip	BB (76,00)	BB (75,42)	99,23	BB (78,00)	BB (73,42)	94,12	-



Tabel 3.54
Dukungan Anggaran Sasaran
Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.167.788.300	799.700.150	68,48
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.408.234.700	3.005.142.371	88,17
program Penelitian dan Pengembangan Daerah	545.000.000	482.810.200	88,59
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.361.661.182.411	1.272.476.790.178	93,45
TOTAL	1.366.782.205.411	1.276.764.442.899	84,67

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.55
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	84,12	1.366.782.205.411	84,67	(0,55)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto dengan rata-rata capaian kinerja 84,12% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 84,67% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini belum mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 18 :

Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif

Nilai SPI (Survey Penilaian Integritas) yang merupakan salah satu target kinerja Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi; Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2022, SPI dilakukan dengan cara elektronik dan tatap muka (CAPI) di 98 Kementrian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dilakukan oleh KPK. Hasil keseluruhan peserta SPI 2022 menunjukkan indeks SPI rata-rata berada diangka 71,94 sementara Kabupaten Mojokerto mendapatkan skor sebesar 74,0.



Hasil Survei Penilaian Integritas 2022 menghasilkan penilaian untuk berbagai dimensi integritas. Berikut adalah rangkuman temuan kondisi integritas di Kabupaten Mojokerto :

- ◁ Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini masih menghadapi beberapa risiko dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Risiko ini harus diantisipasi agar tidak meningkat.
- ◁ Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/pemerasan ketika berhubungan dengan instansi selama 12 bulan relatif rendah. Meskipun demikian, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.
- ◁ Risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek pengelolaan anggaran. Risiko ini dapat terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/ uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
- ◁ Risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek PBJ. Risiko ini terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), adanya risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
- ◁ •Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih terjadi dengan skala sedang (kisaran rata-rata nasional). Risiko ini bisa muncul karena konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/ golongan/organisasi.
- ◁ Sistem pengawasan internal untuk meminimalkan risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) di instansi ini sudah cukup baik, sehingga risiko korupsi relatif terjaga. Meskipun demikian, risiko ini tetap perlu diantisipasi agar di masa mendatang tidak terjadi. Antisipasi dilakukan terutama pada area-area rawan seperti pada saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.
- ◁ Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di instansi ini, dan berdampak cukup efektif terhadap pembentukan perilaku antikorupsi. Sosialisasi antikorupsi perlu tetap dirancang agar efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.



- ◁ Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada pada angka yang relatif baik (di atas rata-rata nasional), terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
- ◁ Kalangan eksternal menilai setidaknya satu aspek dalam indikator transparansi dan keadilan layanan masih memiliki risiko tinggi. Risiko tersebut mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan saat memberikan layanan/ melaksanakan tugas.
- ◁ Meskipun upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah sangat baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi dapat meningkatkan sistem antikorupsi melalui penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga perlu meyakinkan pengguna layanan/ pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.

Tabel. 3.56

Evaluasi Capaian Sasaran Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	70,00	74.7	106,71	70,10	74	105,71	-

Tabel 3.57

Dukungan Anggaran Sasaran Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.905.123.804	11.613.093.385	89,99
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.032.572.600	938.648.046	90,90
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.658.482.290	1.621.729.083	97,78
TOTAL	15.596.178.694	14.173.470.514	90,88

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI



Tabel. 3.58
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif
Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	105,71	15.596.178.694	90,88	14,83

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif dengan rata-rata capaian kinerja 105,71% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 90,88% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 19 :

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah

Tabel. 3.59
Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	-

Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah dengan indikator kinerja nilai opini BPK pada tahun 2022 ditargetkan WTP ter realisasi sebesar WTP dengan capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori penilaian sangat baik.

Tabel 3.60
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah
Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	677.293.117.222	318.881.748.730	47,08
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.559.118.369	3.559.118.369	78,07
TOTAL	681.852.235.591	322.440.867.099	62,57

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI



Tabel. 3.61
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akutansi pemerintah
Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akutansi pemerintah	100	681.852.235.591	62,57	37,43

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatkan Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai standar akutansi pemerintah dengan rata-rata capaian kinerja 100% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 62,57% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 20 :

Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan

Untuk mewujudkan transformasi digital nasional ini, dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, pihak terkait secara keseluruhan untuk mendukung mewujudkan program-program digitalisasi. Selain itu, dengan dinamika yang tinggi, maka pemutakhiran dan perubahan dalam arah kebijakan strategis menjadi hal yang perlu disesuaikan pada perkembangan di setiap tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus berupaya mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung peaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Dengan meningkatkan jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan secara menyeluruh pada perangkat daerah dan unit terkecil yang memberikan layanan langsung ke masyarakat.

Melalui sasaran meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan dengan indikator pengukur capaian indeks SPBE dengan target 2,60 pada tahun 2022 dan teralisasi sebesar 2,73 sehingga berhasil tercapai sebesar 105% dengan kategori sangat berhasil. Hasil evaluasi SPBE nasional tahun 2022 dengan pemantauan dan evaluasi SPBE dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah.



Tabel. 3.62
Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50	2,71	108,4	2,60	2,73	105	-

Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan dukungan anggaran program2 prioritas untuk keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya jaringan komunikasi dan jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan dengan tolak ukur indeks SPBE sebesar Rp. 28.706.380.365 Perangkat daerah pelaksanaan 3 program pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto secara aktif memiliki peran untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan informasi, mendorong penggunaan tanda tangan digital, pengendalian konten, dan upaya perlindungan data pribadi.

Tabel 3.63
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	6.672.548.000	6.369.125.279	95,45
Program Aplikasi Informatika	10.479.071.865	10.151.824.582	96,88
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	397.500.000	394.625.826	99,28
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	177.974.000	176.052.600	98,92
TOTAL	17.727.093.865	17.091.628.287	97,63

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.64
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan	105	17.727.093.865	97,63	7,37

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan dengan rata-rata capaian kinerja 105% dan



capaian penggunaan anggaran sebesar 97,63% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Tabel 3.65
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Misi 4

Misi 4 Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan						
Tujuan		Indikator Tujuan		Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan		Indeks Infrastruktur		13,089	14,248	108,85
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
21	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	26	Persentase Lokasi Kumuh yang tertangani	3,18 % lokasi kumuh	17,18 %	540,25
22	Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau	27	Persentase Penanganan RTH	16,40 %	16,10 %	98,17
23	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	28	Tingkat Keselamatan Transportasi	6,21	38,8	624,80
24	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	29	Persentase infrastruktur kondisi baik	72,38 %	61,03 %	84,31
25	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	30	IKLH	64,20	69,92	108,90
26	Pencegahan dan penanggulangan bencana	31	Indeks Resiko Bencana (IRB)	114,67	99,84	87,06
Rata- Rata Capaian						257,24

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan. Adapun sasaran meliputi pembenahan lokasi kumuh, penghijauan, keselamatan transportasi, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalkan resiko bencana. Kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah, termasuk di dalamnya upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi



terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana .

Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, social, budaya dan pelestarian lingkungan, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan. Adapun sasaran meliputi pembenahan lokasi kumuh, penghijauan, keselamatan transportasi, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalkan resiko bencana.

Kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah, termasuk di dalamnya upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

Sasaran 21 :

Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman

Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”.

Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan upaya-upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain pengentasan kemsikinan, penyuluhan kesehatan lingkungan, pembinaan masyarakat sadar lingkungan, pembangunan infrastruktur publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, pengelolaan kawasan bantaran / sepadan, peningkatan kesehatan masyarakat.

Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 Sasaran strategis untuk menanggulangi Kawasan kumuh di Kabupaten Mojokerto ada pada sasaran Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman dengan indikator kinerja persentase lokasi kumuh yang tertangani dengan target pada tahun 2022 sebesar 3,18% teralisasi sebesar 17,18% sehingga capain kinerja pada tahun 2022 sebesar 540,25%. Dengan kategori kinerja sangat berhasil.



Tabel 3.66

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase Lokasi Kumuh yang tertangani	2,52	3,58	142,06	3,18	17,18	540,25	-

Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaansampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”. Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari.

Kawasan prioritas di Kabupaten Mojokerto berdasarkan kedudukan strategisnya adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Mojosari (PKLp, Kawasan Agropolitan, Kawasan Kumuh)
2. Kecamatan Sooko (PKLp, Kawasan Agropolitan, Kawasan Kumuh)
3. Kecamatan Gedeg (PKLp, Kawasan Agropolitan, Kawasan Kumuh)
4. Kecamatan Pacet (PKLp, Kawasan Agropolitan)
5. Kecamatan Trowulan (Kawasan Mojopahit Park/ Kawasan Cagar Budaya)
6. Kecamatan Jetis (Kawasan Perkotaan Interchange Mlirip)
7. Kecamatan Dawarblandong (Pendukung Kawasan Industri Jetis)
8. Kecamatan Ngoro (Kawasan Perkotaan Airlangga City)
9. Kecamatan Bangsal (Calon Ibukota Kabupaten)

Tabel 3.67

Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pengembangan Perumahan	820.000.000	618.383.400	75,41
Program Kawasan Permukiman	22.857.727.000	21.333.100.516	93,33
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	3.900.000.000	3.368.959.710	86,38
TOTAL	27.577.727.000	25.320.443.626	85,04

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Keberhasilan capaian sasaran ini didukung 3 program prioritas pembangunan 2021-2026 dengan dukungan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 27.577.727.000 dengan perangkat daerah pelaksana program DPRKP2 Kabupaten Mojokerto.



Dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain pengentasan kemsikinan, penyuluhan kesehatan lingkungan, pembinaan masyarakat sadar lingkungan, pembangunan infrastruktur publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, pengelolaan kawasan bantaran / sepadan, peningkatan kesehatan masyarakat.

Tabel. 3.68
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	540,25	27.577.727.000	85,04	455,21

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman dengan rata-rata capaian kinerja 540,25% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 85,04% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.

Sasaran 22 :
Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau

Berkurangnya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) diakibatkan adanya alih fungsi lahan. Laju alih fungsi lahan dari tanah pertanian atau lahan terbuka menjadi kawasan permukiman, kawasan komersial, dan sejenisnya yang cukup pesat ini menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian/ lahan terbuka di Kabupaten Mojokerto.

Salah satu Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara adalah dengan meningkatkan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau dapat berfungsi untuk menyaring polusi dan memproduksi oksigen. Meningkatkan ruang terbuka hijau dengan menanam tanaman yang mampu untuk menyerap polusi di area sekitar sumber pencemar dapat meningkatkan kualitas udara.

Tabel 3.69
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase Penanganan RTH	14,56	4,63	31,79	16,40 %	16,10 %	98,17	-



Penurunan Indeks Kualitas Lahan (IKL) disebabkan karena pengelolaan inventarisasi data yang kurang baik. Berdasarkan pada table luas lahan menurut fungsi/status kawasan hutan, memang belum ada pemanfaatan ruang di Kabupaten Mojokerto yang dipakai untuk ruang terbuka hijau (RTH). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Luas Kawasan Hutan menurut Fungsi/Status Kabupaten Mojokerto

FUNGSI HUTAN	LUAS
Hutan Produksi	4.0629
Hutan Lindung	4402,7
Taman nasional	0
Taman wisata alam	0
Taman Buru	0
Cagar Budaya	0
Suaka Margasatwa	11.276
Tahura	10.181
STATUS HUTAN	LUAS
Hutan negara	4.0629
Hutan hak /hutan rakyat	0
Hutan kota	0
Tahura	10.181
Taman keanekaragaman hayati	0

Sumber : RPJMD/Perum Perhutani KPH Mojokerto, Tahun 2021

Tabel 3.70
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	150.000.000	136.734.000	91,16
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.052.003.584	993.586.612	94,45
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.165.000.000	2.894.184.198	91,44
TOTAL	4.367.003.584	4.024.504.810	92,35

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Untuk mencapai sasaran ini didukung dengan 3 program prioritas dengan total anggaran sebesar Rp. 4.367.003.584, dengan perangkat daerah pelaksana program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.



Tabel. 3.71
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau	16,10	4.367.003.584	92,35	(76,25)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau dengan rata-rata capaian kinerja 16,10% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 92,35% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini belum mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran karena anggaran yang ada hanya untuk perawatan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan belum dapat untuk menambah luasan Ruang Terbuka Hijau selain itu pengelolaan inventarisasi data yang kurang baik sehingga terdapat beberapa data yang belum terinventarisasi dan menyebabkan Indeks Kualitas Lahan (IKL) belum mencapai target.

Sasaran 23 :

Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi

Dalam kedudukannya sebagai unsur bidang Transportasi, Pos dan Telekomunikasi serta dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, Pelayanan teknis dalam rangka menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi penyedia jasa pengguna transportasi kendaraan bermotor yang memenuhi Persyaratan teknis dan layak jalan.

Kondisi jalan akan berpengaruh terhadap lancarnya jalannya transportasi, struktur pendukung laju transportasi dikembangkan secara optimal melalui berbagai usaha bersama seluruh elemen, terutama yang berhubungan langsung dengan pelaku transportasi.

Pemenuhan fasilitas kebutuhan mobilisasi masyarakat untuk melakukan kegiatannya menjadi hal yang utama yaitu pemenuhan kebutuhan layanan transportasi. Transportasi yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto sangat tergantung pada transportasi jalan, sehingga dapat dikatakan transportasi jalan merupakan urat nadi transportasi di Kabupaten Mojokerto, sehingga penanganan transportasi jalan tidak boleh sepotong - potong dan dapat terintegrasi dengan baik. Kedudukan dan fungsi sarana dan prasarana jalan yang sedemikian pentingnya menjadikan infrastruktur jalan ini harus dikelola secara baik secara manajerial maupun konstruksi. Pengelolaan akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan manajemen lalu lintas yang baik.

Total Panjang Jalan Kabupaten Mojokerto *1.041,324 km* sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/284/416-012/2018 tentang Status Ruas Jalan Kabupaten Mojokerto, sampai dengan akhir tahun 2022 jalan kondisi baik sepanjang *829, 614 km (79,67 %)*. Sampai dengan akhir tahun 2022 Jalan kondisi baik sepanjang *804,378 km (77,24 %)*



dan kondisi sedang sepanjang 114,520 km (11,00 %). Total Panjang Jalan Kabupaten dengan kondisi mantap adalah 937,898 km (88,24 %).

Tabel 3.72
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Tingkat Keselamatan Transportasi	5,10	55.77	1.093,52	6,21	38,8	624,80	-

Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi pada tahun 2022 ditargetkan 6,21% terrealisasi sebesar 38,8% dengan capaian kinerja mencapai 624,80%. Nilai ini diperoleh dari rata-rata persentase angkutan yang layak jalan 56,49% ditambah persentase faskes jalan 21,22% pada tahun 2022.

Tabel 3.73
Dukungan Anggaran Sasaran
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.095.375.500	8.677.114.375	95,40

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.74
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	100	9.095.375.500	95,40	4,6

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi dengan rata-rata capaian kinerja 100% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 95,40% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran. Untuk upaya peningkatan keselamatan juga harus memenuhi aspek dari prinsip jalan berkeselamatan yaitu :

1. Self Explaining yaitu infrastruktur perlengkapan jalan yang mampu untuk memandu pengguna jalan.
2. Self Enforcement yaitu infrastruktur perlengkapan jalan yang mampu untuk menciptakan kepatuhan pengguna jalan.



3. Forgiveing Road User yaitu infrastruktur perlengkapan jalan yang mampu untuk meminimalisir/mengurangi kesalahan pengguna jalan.

Sasaran 24 :

Pemerataan, dan perluasan insfrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung

Analisis kinerja infrastruktur dilakukan terhadap beberapa indikator meliputi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon. Infrastruktur yang tersedia dapat menunjang daya saing daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi pada berbagai sektor di daerah dan antar wilayah.

Tabel 3.75

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerataan, dan perluasan insfrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Persentase infrastruktur kondisi baik	71,88	74.39	103,49	72,38	61,03	84,31	-

Sasaran pemerataan dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung dengan indikator kinerja persentase infrastruktur kondisi baik pada tahun 2022 ditargetkan 72,38 terrealisasi sebesar 61,03 dengan capaian kinerja mencapai 84,31%.

Tabel 3.76

Dukungan Anggaran Sasaran

Pemerataan, dan perluasan insfrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.618.550.200	8.398.617.393	87,32
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	5.954.232.700	4.644.007.981	78,00
Program Pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional	2.929.836.500	2.900.893.346	99,01

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI



Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	2.664.947.500	2.620.203.500	98,32
Pengelolaan dan pengembangan system drainase	6.459.392.650	4.983.742.350	77,15
Program Penataan bangunan gedung	9.519.000.000	6.841.170.623	71,87
Program Pengembangan jasa konstruksi	525.000.000	474.828.850	90,44
Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	9.095.375.500	8.677.114.375	95,40
Program Penyelenggaraan penataan ruang	2.225.000.000	1.795.701.144	80,71
Program Pengelolaan sumber daya air	9.618.550.200	8.398.617.393	87,32
Program Penyelenggaraan jalan	167.021.029.772	139.705.797.058	83,65
TOTAL	225.630.915.022	189.440.694.013	86,29

Tabel. 3.77

Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran

Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	74,38	225.630.915.022	86,29	(11,91)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung dengan rata-rata capaian kinerja 74,38% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 86,29% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini belum mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran karena Pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan infrastruktur perlu ditingkatkan dengan melibatkan stakeholder dan perlu adanya peningkatan pembangunan termasuk pemeliharaan rutin dan priodik dilakukan secara terus menerus oleh pihak terkait.

Sasaran 25 :

Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks dapat menjadi angka atau titik referensi kualitas lingkungan, apakah pada posisi kondisi yang baik atau buruk atau pada kisaran keduanya. Indeks bermakna sebagai pembanding atau komparasi, dimana suatu subyek relatif terhadap subyek lainnya.



Nilai IKLH Nasional mengalami peningkatan sebesar 1,01 dengan nilai IKLH Tahun 2021 sebesar 71,41 menjadi 72,42. Nilai IKLH Provinsi mengalami peningkatan sebesar 1,63 dari IKLH Tahun 2021 sebesar 68,29 menjadi 69,92 untuk Tahun 2022. Meskipun capaian IKLH Kabupaten Mojokerto masih dibawah IKLH nasional, namun sudah mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 0,17%.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Nasional

Indeks	2021	2022	Kategori
IKA Nasional	52,70	53,88	
IKU Nasional	87,36	88,06	
IKTL Nasional	60,72	60,72	
IKAL Nasional	81,04	84,41	
IKLH Nasional	71,41	72,42	Baik
IKA Prov. Jatim	53,57	56,13	
IKU Prov. Jatim	83,20	84,28	
IKTL Prov. Jatim	50	47,36	
IKAL Prov. Jatim	82,46	85,45	
IKLH Prov. Jatim	68,29	69,92	Sedang
IKA Kab. Mojokerto	60	61,33	
IKU Kab. Mojokerto	90,18	89,37	
IKTL Kab. Mojokerto	48,71	48,71	
IKLH Kab. Mojokerto	69,75	69,92	Sedang

Tabel 3.78

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
IKLH	63,88	69,75	109,18	64,20	69,92	108,90	-

Sasaran terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas pada tahun 2022 ditargetkan 64,20% terrealisasi sebesar 69,92% dengan capaian kinerja mencapai 108,90%.

Tabel 3.79

Dukungan Anggaran Sasaran Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.929.836.500	2.900.893.346	99,01
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	45.000.000	25.837.000	57,42
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin	195.000.000	192.897.200	98,92



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	160.000.000	143.159.644	89,47
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	40.000.000	33.131.800	82,83
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	55.000.000	27.950.999	50,82
Program Pengelolaan Persampahan	6.168.113.950	5.823.951.516	94,42
TOTAL	9.592.950.450	9.147.821.505	81,84

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.80
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	69,92	9.592.950.450	81,84	(11,92)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan rata-rata capaian kinerja 69,92% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 81,84% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini belum mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran karena Program pengurangan sampah dengan metode 3R (reduce, reuse, dan recycle) masih belum optimal serta Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) cenderung tetap, padahal memiliki fungsi utama untuk menyerap polutan udara kendaraan bermotor di sekitar kawasan kota.

Sasaran 26 :

Pencegahan dan penanggulangan bencana

Sasaran pencegahan dan penanggulangan bencana dengan indikator kinerja Indeks Resiko Bencana (IRB) pada tahun 2022 ditargetkan 114,67 ter realisasi sebesar 99,84 dengan capaian kinerja mencapai 87,06% dengan kategori penilaian baik.

Indeks rasio bencana ini bermanfaat untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana disuatu wilayah. Semakin tinggi tingkat kerentanan daerah dan semakin rendahnya kapasitas membuat semakin tingginya risiko terhadap bencana. Oleh karena itu, pengkajian risiko bencana sangat bergantung kepada komponen bahaya yang mengancam, kerentanan kawasan yang terancam, dan kapasitas kawasan terancam.

Strategi kita dalam mengantisipasi kejadian bencana di Kabupaten Mojokerto adalah dengan mengetahui risiko bencana di suatu wilayah, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan tata kelola upaya penanggulangan bencana yang lebih baik. Hal ini juga sejalan



dengan perubahan paradigma upaya penanggulangan bencana di tingkat global, yaitu dari upaya responsif yang berfokus pada saat terjadinya bencana ke upaya preventif yang lebih menitikberatkan pada upaya sebelum kejadian bencana dan pengelolaan risiko bencana.

Setelah mengetahui risiko bencana di suatu wilayah, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan tata kelola upaya penanggulangan bencana yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan perubahan paradigma upaya penanggulangan bencana di tingkat global, yaitu dari upaya responsif yang berfokus pada saat terjadinya bencana ke upaya preventif yang lebih menitikberatkan pada upaya sebelum kejadian bencana dan pengelolaan risiko bencana.

Tabel 3.81
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Pencegahan dan penanggulangan bencana Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja 2021	2022		Capaian Kinerja 2022	Nasional
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Indeks Resiko Bencana (IRB)	117,68	110,69	94,06	114,67	99,84	87,06	-

Tabel 3.82
Dukungan Anggaran Sasaran
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Tahun 2022

Urusan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	9.841.708.177	7.453.704.871	75,74
Program Penanggulangan Bencana	2.479.504.750	2.410.791.102	97,23
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	6.974.366.067	6.892.173.450	98,82
TOTAL	19.295.578.994	16.756.669.423	90,59

Sumber data LRA BPKAD TA 2022 update data bulan Februari 2023 sebelum audit BPK RI

Tabel. 3.83
Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Tahun 2022

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja 2022	Anggaran (Rp)	% Capaian Penggunaan Anggaran	% Efisiensi
Pencegahan dan penanggulangan bencana	99,84	19.295.578.994	90,59	0,25

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kinerja Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan rata-rata capaian kinerja 99,84% dan capaian penggunaan anggaran sebesar 90,84% maka dapat dikatakan pada kinerja utama ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran.



3.3 REALISASI ANGGARAN

NO	URUSAN/ PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2022		% CAPAIAN
		ANGGARAN	REALISASI	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.635.313.046.872	1.198.345.381.738	73,28
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	777.313.320.326	703.251.782.500	90,47
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	547.071.643.211	484.653.126.487	88,59
4	Program Pengelolaan Pendidikan	200.521.717.115	182.452.961.756	90,99
5	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	530.135.342.355	212.421.801.538	40,07
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	349.134.116.041	104.087.391.924	29,81
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	170.133.845.012	99.033.911.640	58,21
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.292.400.000	6.992.385.000	95,89
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	326.000.000	283.522.800	86,97
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.114.981.302	2.024.590.174	95,73
11	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	233.928.683.666	198.013.482.489	84,65
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.011.694.344	25.648.520.244	94,95
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	9.618.550.200	8.398.617.393	87,32
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.954.232.700	4.644.007.981	78,00
15	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.929.836.500	2.900.893.346	99,01
16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.664.947.500	2.620.203.500	98,32
17	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	6.459.392.650	4.983.742.350	77,15
18	Program Penataan Bangunan Gedung	9.519.000.000	6.841.170.623	71,87
19	Program Penyelenggaraan Jalan	167.021.029.772	139.705.797.058	83,65
20	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	525.000.000	474.828.850	90,44
21	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.225.000.000	1.795.701.144	80,71
22	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	38.028.112.000	34.757.103.464	91,40
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.450.385.000	9.436.659.838	90,30
24	Program Pengembangan Perumahan	820.000.000	618.383.400	75,41
25	Program Kawasan Permukiman	22.857.727.000	21.333.100.516	93,33
26	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	3.900.000.000	3.368.959.710	86,38
27	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	34.028.153.785	29.875.104.749	87,80
28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.732.574.791	13.118.435.326	89,04
29	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	9.841.708.177	7.453.704.871	75,74
30	Program Penanggulangan Bencana	2.479.504.750	2.410.791.102	97,23
31	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	6.974.366.067	6.892.173.450	98,82
32	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	21.879.434.740	20.026.106.998	91,53



33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.255.429.640	6.231.904.373	85,89
34	Program Pemberdayaan Sosial	1.840.000.000	1.736.915.737	94,40
35	Program Rehabilitasi Sosial	659.880.832	615.103.662	93,21
36	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	11.824.124.268	11.191.185.765	94,65
37	Program Penanganan Bencana	300.000.000	250.997.461	83,67
38	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	160.349.300.863	136.708.513.724	85,26
39	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	7.391.909.609	6.403.414.612	86,63
40	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.615.629.609	4.871.438.870	86,75
41	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.135.000.000	920.926.700	81,14
42	Program Penempatan Tenaga Kerja	256.280.000	234.342.892	91,44
43	Program Hubungan Industrial	385.000.000	376.706.150	97,85
44	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.105.691.100	1.080.697.265	97,74
45	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	562.969.000	552.079.015	98,07
46	Program Perlindungan Perempuan	194.908.197	190.152.900	97,56
47	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	10.000.000	9.574.750	95,75
48	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	25.000.000	24.287.000	97,15
49	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	80.000.000	76.325.100	95,41
50	Program Perlindungan Khusus Anak	232.813.903	228.278.500	98,05
51	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	10.839.114.700	9.423.173.782	86,94
52	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.420.983.700	5.694.239.327	88,68
53	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	2.100.000.000	2.077.793.000	98,94
54	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.165.791.000	1.503.305.680	69,41
55	Program Penanganan Kerawanan Pangan	50.000.000	49.901.800	99,80
56	Program Pengawasan Keamanan Pangan	102.340.000	97.933.975	95,69
57	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	349.796.000	46.920.600	13,41
58	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	15.000.000	13.533.000	90,22
59	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	15.000.000	14.340.000	95,60
60	Program Penatagunaan Tanah	319.796.000	19.047.600	5,96
61	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	25.302.078.901	23.804.279.660	94,08
62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.271.961.367	13.532.846.691	94,82
63	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	150.000.000	136.734.000	91,16
64	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.052.003.584	993.586.612	94,45
65	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.165.000.000	2.894.184.198	91,44
66	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	45.000.000	25.837.000	57,42
67	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	195.000.000	192.897.200	98,92



68	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	160.000.000	143.159.644	89,47
69	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	40.000.000	33.131.800	82,83
70	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	55.000.000	27.950.999	50,82
71	Program Pengelolaan Persampahan	6.168.113.950	5.823.951.516	94,42
72	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.996.104.244	8.950.225.299	89,54
73	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.485.987.244	7.488.814.231	88,25
74	Program Pendaftaran Penduduk	877.117.000	863.240.086	98,42
75	Program Pencatatan Sipil	383.000.000	377.039.762	98,44
76	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	250.000.000	221.131.220	88,45
77	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	16.579.525.608	15.590.856.255	94,04
78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.014.525.608	5.037.590.314	83,76
79	Program Penataan Desa	250.000.000	249.161.850	99,66
80	Program Peningkatan Kerjasama Desa	180.000.000	165.982.850	92,21
81	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.696.975.000	8.915.483.891	91,94
82	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.303.750.000	1.222.637.350	93,78
83	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	18.975.009.256	15.920.986.150	83,91
84	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.957.325.256	5.330.149.754	89,47
85	Program Pengendalian Penduduk	426.865.000	411.419.000	96,38
86	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.005.299.000	6.765.934.196	96,58
87	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.585.520.000	3.413.483.200	61,11
88	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	9.647.375.500	9.229.114.375	95,66
89	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	552.000.000	552.000.000	100,00
90	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.095.375.500	8.677.114.375	95,40
91	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	28.706.380.365	24.063.124.723	83,83
92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.554.760.500	7.542.174.862	65,27
93	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	6.672.548.000	6.369.125.279	95,45
94	Program Aplikasi Informatika	10.479.071.865	10.151.824.582	96,88
95	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	8.540.987.000	8.034.166.046	94,07
96	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.731.787.000	4.304.857.375	90,98
97	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	75.000.000	72.786.600	97,05
98	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	50.000.000	48.987.100	97,97
99	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	519.200.000	490.931.691	94,56
100	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	510.000.000	504.364.800	98,90
101	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	160.000.000	152.711.480	95,44
102	Program Pengembangan Umkm	2.495.000.000	2.459.527.000	98,58
103	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	7.250.763.000	5.674.888.577	78,26



104	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.132.369.000	4.605.149.245	75,10
105	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	155.000.000	152.532.570	98,41
106	Program Promosi Penanaman Modal	115.000.000	113.136.100	98,38
107	Program Pelayanan Penanaman Modal	270.000.000	259.743.369	96,20
108	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	553.394.000	520.267.293	94,01
109	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	25.000.000	24.060.000	96,24
110	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	8.066.462.240	7479490365	92,72
111	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	510.000.000	4.75.041.111	93,14
112	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.356.462.240	7.279.490.365	98,95
113	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000	200.000.000	100,00
114	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	397.500.000	394.625.826	99,28
115	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	397.500.000	394.625.826	99,28
116	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	200.000.000	176.052.600	88,03
117	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	177.974.000	176.052.600	98,92
118	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1.827.306.940	1.373.058.345	75,14
119	Program Pengembangan Kebudayaan	811.398.780	784.739.300	96,71
120	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	255.500.000	223.103.096	87,32
121	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	760.408.160	365.215.949	48,03
122	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	5.113.296.400	4.678.429.271	91,50
123	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.708.324.400	4.296.791.762	91,26
124	Program Pembinaan Perpustakaan	404.972.000	321.738.959	79,45
125	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	60.000.000	59.898.550	99,83
126	Program Pengelolaan Arsip	45.000.000	44.898.550	99,77
127	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	15.000.000	15.000.000	100,00
128	Urusan Pemerintahan Pilihan	65.616.299.454	65.205.252.626	99,37
129	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	1.432.250.000	1.336.266.550	93,30
130	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	90.000.000	89.999.600	100,00
131	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.129.250.000	1.035.277.200	91,68
132	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	213.000.000	210.989.750	99,06
133	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	13.868.167.560	12.087.623.619	87,16
134	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.591.543.000	6.450.561.613	84,97
135	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.635.874.560	3.071.662.200	84,48
136	Program Pemasaran Pariwisata	2.340.750.000	2.270.111.726	96,98
137	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	190.000.000	185.459.080	97,61
138	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	110.000.000	109.829.000	99,84
139	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	32.622.744.332	28.842.750.261	88,41
140	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.247.648.120	19.006.620.417	93,87
141	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.316.428.315	4.535.691.417	71,81



142	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.573.808.897	2.219.232.557	86,22
143	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	500.000.000	474.835.650	94,97
144	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	271.500.000	238.439.050	87,82
145	Program Perizinan Usaha Pertanian	18.000.000	16.790.000	93,28
146	Program Penyuluhan Pertanian	2.695.359.000	2.351.141.170	87,23
147	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	14.968.596.853	13.186.975.173	88,10
148	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.304.713.505	7.800.605.661	93,93
149	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	10.000.000	7.585.000	75,85
150	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.283.108.270	4.166.793.600	78,87
151	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	363.770.200	150.697.300	41,43
152	Program Pengembangan Ekspor	144.000.383	122.270.075	84,91
153	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	847.004.495	777.203.237	91,76
154	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	195.000.000	161.820.300	82,98
155	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	10.850.254.214	9.751.637.023	89,87
156	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.304.713.505	7.800.605.661	93,93
157	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.255.540.709	1.664.202.500	73,78
158	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	120.000.000	117.543.862	97,95
159	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	170.000.000	169.285.000	99,58
160	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	168.191.884.399	155.588.519.045	92,51
161	Sekretariat Daerah	78.146.856.465	73.230.223.309	93,71
162	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.638.638.315	43.198.452.870	92,62
163	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	29.288.218.150	28.099.220.693	95,94
164	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.220.000.000	1.932.549.746	87,05
165	Sekretariat DPRD	90.045.027.934	82.358.295.736	91,46
166	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.591.704.100	43.718.792.822	91,86
167	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	42.453.323.834	38.639.502.914	91,02
168	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	866.285.917.542	746.185.362.664	86,14
169	Perencanaan	13.100.088.519	11.423.517.463	87,20
170	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.524.065.519	7.618.674.942	89,38
171	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.167.788.300	799.700.150	68,48
172	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.408.234.700	3.005.142.371	88,17
173	Keuangan	841.061.789.540	729.806.426.553	86,77
174	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	150.635.229.349	399.275.986.445	265,06
175	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	677.293.117.222	318.881.748.730	47,08
176	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.559.118.369	3.559.118.369	78,07
177	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.574.324.600	8.089.573.009	94,35
178	Kepegawaian	8.862.502.233	7.558.819.388	85,28
179	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.012.226.920	5.519.596.761	91,80



180	Program Kepegawaian Daerah	2.850.275.313	2.039.222.627	71,54
181	Pendidikan Dan Pelatihan	2.716.537.250	2.433.385.821	89,58
182	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.716.537.250	2.433.385.821	89,58
183	Penelitian Dan Pengembangan	545.000.000	482.810.200	88,59
184	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	545.000.000	482.810.200	88,59
185	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	15.596.178.694	14.173.470.514	90,88
186	Inspektorat Daerah	15.596.178.694	14.173.470.514	90,88
187	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.905.123.804	11.613.093.385	89,99
188	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.032.572.600	938.648.046	90,90
189	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.658.482.290	1.621.729.083	97,78
190	Unsur Kewilayahan	69.258.549.186	64.258.649.186	92,78
191	Kecamatan	69.258.549.186	64.258.649.186	92,78
192	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58.873.802.783	54.713.577.879	92,93
193	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	484.302.071	601.207.784	124,14
194	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.952.815.000	3.280.417.000	82,99
195	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.812.629.332	5.663.446.523	97,43
196	Unsur Pemerintahan Umum	9.073.913.901	8.242.226.121	90,83
197	Kesatuan Bangsa Dan Politik	9.073.913.901	8.242.226.121	90,83
198	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.521.980.880	3.046.923.921	86,51
199	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	160.000.000	155.367.300	97,10
200	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	230.000.000	207.785.800	90,34
201	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.011.933.021	3.974.928.100	99,08
202	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	200.000.000	181.785.800	90,89
203	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	950.000.000	675.435.200	71,10



BAB IV

PENUTUP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penerapan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2022 dengan memegang prinsip akuntabilitas kinerja yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka laporan kinerja tahun 2022 menyajikan capaian kinerja RPJMD periode 2021-2026. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya dari baseline capaian kinerja 2021 sampai dengan 2026. Pencapaian kinerja misi Bupati Mojokerto terpilih periode 2021 – 2026 dapat disampaikan sebagai berikut :

- A. Pencapaian misi masa periode perencanaan 2021-2026 dengan visi : *Í H Y f k i ^ i X b m U Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Misi 1 : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan				
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,03	74,89	99,81
Rata – rata Capaian				99,81
Misi 2 : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan				
Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada agrobisnis, agroindustry, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	01,17-4,70	5,09	108,29
	Indeks Gini	0,317	0,327	103,15
Rata – rata Capaian				105,72
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan				
Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	BB (70,5)	B (64,91)	92,05
Rata – rata Capaian				92,05
Misi 4 : Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan				
Tujuan 4 : Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan	Indeks Infrastruktur	13,089	14.248	108,85



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan				
Rata- Rata Capaian				108,85

Pencapaian kinerja Misi Bupati periode Tahun 2022 diakumulasi dari rata-rata capaian indikator sasaran dan indikator utama/tujuan. Pencapaian kinerja 4 misi Bupati mengalami fluktuatif.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan, meskipun masih terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

Dengan semangat baru dengan peningkatan kualitas AKIP dan juga penguatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas SDM aparatur sebagai ASN yang memegang nilai budaya kerja yang berkinerja melalui internalisasi core value ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Dapatif dan Kolaboratif melalui 3 perilaku utama ASN di Kabupaten Mojokerto yaitu Integritas, Profesional dan Pengabdian, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto kedepan pasti bias lebih baik.

Dengan semangat baru dan pola berpikir ASN kelas dunia sebagaimana program nasional dalam mereformasi birokrasi di Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap berhasil mencapai visi-misi KDH WKDH terpilih 2021-2026 menuju Mojokerto Maju, Mojokerto Adil dan Mojokerto Makmur demi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Kerja keras dengan tekad bersama kita bisa menuju mencapai visi “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” dengan 4 misi dan program prioritas 3M/5M Mojokerto Maju Mojokerto Adil Mojokerto Makmur/Mojokerto Cerdas, Mojokerto sehat, Mojokerto Indah, Mojokerto Berkah, Mojokerto Aman.

Mojokerto, Maret 2023

Bupati Mojokerto

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si